

**PERKEMBANGAN EKONOMI
DAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Triwulan I - 2006

**Kantor Bank Indonesia
Batam**

Visi Bank Indonesia

Menjadi lembaga bank sentral yang dapat dipercaya secara nasional maupun internasional melalui penguatan nilai-nilai yang dimiliki serta pencapaian inflasi yang rendah dan stabil

Misi Bank Indonesia

Mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah melalui pemeliharaan kestabilan moneter dan pengembangan stabilitas sistem keuangan untuk pembangunan jangka panjang negara Indonesia yang berkesinambungan

Visi Kantor Bank Indonesia Batam

Menjadi lembaga yang kredibel melalui kebijakan yang berhasil guna, peningkatan kompetensi dan kemitraan strategis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan

Misi Kantor Bank Indonesia Batam

Merupakan bagian jaringan Bank Indonesia yang berperan dalam perencanaan, pelaksanaan fungsi dan kebijakan BI serta melaksanakan tugas-tugas pendukung lainnya di daerah

Kantor Bank Indonesia Batam
Jl. Engku Putri - Batam Center
B A T A M
Telp. 0778 - 462280
Fax. 0778 - 462254

Cover Depan : Nongsa Point Marina

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dengan kuasanya maka Laporan Perkembangan Ekonomi dan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Triwulan I-2006 dapat diselesaikan. Laporan ini merupakan kajian rutin triwulanan yang disusun oleh Kantor Bank Indonesia Batam, guna memenuhi kebutuhan intern Bank Indonesia serta kebutuhan ekstern mengenai berbagai informasi yang berkaitan dengan perkembangan indikator perekonomian daerah antara lain di bidang Makro Ekonomi, Moneter, Perbankan dan Keuangan Daerah. Laporan Perkembangan Ekonomi dan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Riau periode triwulan I-2006 ini sebagai kajian berkala yang meliputi data-data dan kajian wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang resmi terbentuk sejak 1 Juli 2004.

Data dan informasi yang terdapat pada laporan ini diperoleh dari beberapa pihak, diantaranya Badan Pusat Statistik, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Otorita Batam, Pemerintah Kota dan Kabupaten se-Kepri, dinas-dinas terkait termasuk dari Bank Indonesia

Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan laporan ini. Kami berharap agar hubungan baik ini tetap terjaga dan dapat ditingkatkan lagi di masa yang akan datang. Disamping itu kami juga mengharapkan masukan, saran serta penyediaan data yang lebih lengkap dari semua pihak agar kualitas dari hasil laporan ini lebih baik lagi untuk masa yang akan datang.

Akhir kata semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu melimpahkan rahmat-Nya serta memberikan kemudahan kepada kita semua dalam upaya meningkatkan kinerja untuk pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Batam, April 2006

ttd

Tindomora Siregar

Pemimpin

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GRAFIK	iv
DAFTAR LAMPIRAN.....	v
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	1
BAB I. PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO PROVINSI KEPULAUAN RIAU	
1.1 Kondisi Umum.....	7
1.2 Ketenagakerjaan	11
1.3 Penanaman Modal	11
1.4 Pariwisata	13
1.5 Pedagang Valuta Asing (PVA) Bukan Bank	15
1.6 Penduduk	16
BAB II. PERKEMBANGAN INFLASI	
2.1 Kondisi Umum.....	17
2.2 Inflasi Berdasarkan Kelompok Komoditi.....	20
BAB III. PERKEMBANGAN MONETER, PERBANKAN DAN SISTEM PEMBAYARAN	
3.1 Kondisi Umum.....	21
3.2 Moneter	21
3.3 Perbankan	23
3.3.1 Perkembangan Total Asset Bank Umum.....	24
3.3.2 Perkembangan Penghimpunan Dana Bank Umum	25
3.3.3 Perkembangan Penyaluran Kredit Bank Umum	27
BAB IV. KEUANGAN DAERAH PERIODE TAHUN 2005	
4.1 APBD Provinsi Kepulauan Riau	31
4.2 APBD Kota Batam	32
BAB V. PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH	
5.1 Pertumbuhan Ekonomi	35
5.2 Prospek Inflasi	36
5.3 Prospek Perbankan	36

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Pertumbuhan PDRB Provinsi Kepri menurut lapangan usaha.....	8
Tabel 1.2 PDRB Provinsi Kepri atas dasar harga konstan '00 menurut lapangan usaha.....	9
Tabel 1.3 PDRB Provinsi Kepri menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku	9
Tabel 1.4 Distribusi PDRB Provinsi Kepri menurut lapangan usaha.....	10
Tabel 1.5 Perkembangan jumlah tenaga kerja Kota Batam	11
Tabel 1.6 Perkembangan rencana investasi asing (PMA) di Batam.....	12
Tabel 1.7 Perkembangan jumlah kunjungan wisatawan manca negara ke Batam	14
Tabel 1.8 Perkembangan negara asal kunjungan wisatawan manca negara ke Batam	15
Tabel 1.9 Penyebaran Penduduk Mnrt Kec dan Jenis Kelamin di Kota Batam .	16
Tabel 2.1 Perkembangan Inflasi Kota Batam	19
Tabel 2.2 Tingkat Inflasi dan Andil Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran	19
Tabel 2.3 Perkembangan inflasi kota Batam menurut kelompok komoditi .	20
Tabel 3.1 Perkembangan Uang Giral dan Kuasi Di Wilker KBI Batam.....	22
Tabel 3.2 Perkembangan Suku Bunga (%)	22
Tabel 3.3 Perkembangan Indikator Perbankan di Wilker KBI Batam	23
Tabel 3.4 Perkembangan Total Asset Perbankan di Wilker KBI Batam....	24
Tabel 3.5 Penghimpunan Dana Bank Umum di wilker KBI Batam.....	26
Tabel 3.6 Perkembangan Outstanding Kredit Bank Umum di wilker KBI Batam	28
Tabel 3.7 Perkembangan Penyaluran Kredit Bank Umum	29

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 1.1	Perkembangan PDRB (Rp Juta) dan LPE triwulanan 7
Grafik 1.2	Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha atas Dasar Harga Berlaku ... 10
Grafik 2.1	Perkembangan Laju Inflasi Batam 18
Grafik 2.2	Perkembangan Inflasi Kota Batam, Pekanbaru dan Nasional 18
Grafik 3.1	Perkembangan Total Aset Bank Umum di Wilker BI-Batam 25
Grafik 3.2	Perkembangan Total DPK Bank Umum Wilker KBI Batam 27
Grafik 3.3	Perkembangan Outstanding Kredit Bank Umum di Wilker KBI Batam .. 28
Grafik 3.4	Komposisi Penyaluran Kredit di Wilker KBI Batam Tw.I – 2006 29

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Tabel 1 PDRB Provinsi Kepri atas dasar harga konstan 2000.....	38
Tabel 2 Perkembangan indeks harga konsumen (IHK) kota Batam.....	39
Tabel 3 Perkembangan inflasi kota Batam, Pekanbaru dan Nasional...	40
Tabel 4 Data bank umum wilayah kerja Bank Indonesia Batam.....	41
Tabel 5 Data bank umum wilayah Batam	42
Tabel 6 Data bank umum wilayah Kepulauan Riau	43
Tabel 7 Data pengaliran kas masuk/keluar dan kegiatan PTTB KBI Batam	44
Tabel 8 Perputaran kliring Batam, Tanjung Pinang dan Tj. Balai Karimun	45

RINGKASAN EKSEKUTIF

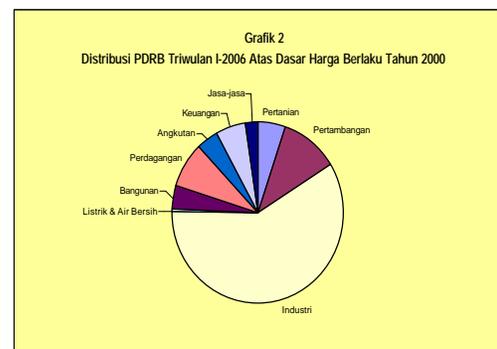
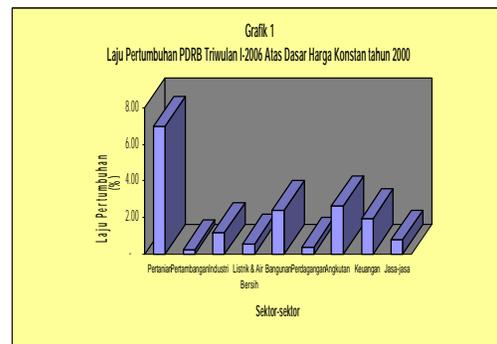
KAJIAN PERKEMBANGAN EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TRIWULAN I-2006

Perkembangan Ekonomi Regional

Perekonomian Kepri tumbuh lebih rendah dibanding pada triwulan IV-2005

Memasuki triwulan I-2006, perekonomian Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) pertumbuhan PDRB berdasarkan harga berlaku adalah sebesar 2,71% dan berdasarkan harga konstan '2000 sebesar 1,42% dan lebih rendah dibandingkan pertumbuhan triwulan IV-2005 yaitu masing-masing sebesar 3,39% dan 1,71%. Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan '2000 menunjukkan bahwa sektor industri pengolahan merupakan kontributor terbesar yaitu sebesar 67,52% terhadap PDRB Provinsi Kepri pada triwulan I-2006 meskipun hanya tumbuh sebesar 1,17%. Selain sektor industri pengolahan, sektor-sektor lainnya juga mengalami pertumbuhan antara lain sektor pertanian (7,03%), angkutan (2,65%), bangunan (2,43%), keuangan (1,90%), industri (1,17%), jasa-jasa (0,78%), listrik & air bersih (0,50%), perdagangan (0,35%), dan sektor pertambangan (0,21%).

Pertumbuhan sektor pertanian ditunjang oleh meningkatnya produksi tanaman pangan dan kehutanan dimana kedua sektor tersebut mengalami pertumbuhan masing-masing sebesar 65,42% dan 8,82%. Sedangkan sektor industri mengalami pertumbuhan melambat sebesar 1,17% lebih rendah dibandingkan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya. Struktur perekonomian Provinsi Kepulauan Riau



menunjukkan bahwa sektor industri masih merupakan sektor unggulan dengan kontribusi terhadap total PDRB berdasarkan harga konstan tahun

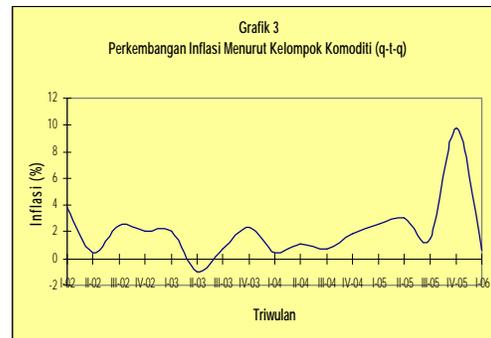
2000 sebesar 67,52%, diikuti perdagangan (7,97%), pertambangan (6,63%), pertanian (4,78%), keuangan (4,45%), angkutan (3,87%), bangunan (2,64%), jasa-jasa (1,90%), dan listrik (0,23%).

Perkembangan Inflasi Regional

Laju inflasi pada triwulan I-2006 lebih rendah daripada inflasi triwulan IV-2005

Laju inflasi regional (q-t-q) Provinsi Kepri pada triwulan I-2006 tercatat sebesar 0,66%. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan inflasi pada triwulan IV-2005 sebesar 9,72%. Menurunnya laju inflasi tersebut disebabkan turunnya ekspektasi masyarakat terhadap kenaikan harga barang-barang sehubungan dengan dibatalkannya kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) oleh Pemerintah, serta membaiknya distribusi sembako terutama beras dan gula.

Dari sisi kelompok komoditi, inflasi terjadi pada semua kelompok komoditi kecuali kelompok pendidikan, rekreasi & olah raga yang mengalami deflasi sebesar -0,24. Sementara itu, kontributor terbesar terhadap pembentukan laju inflasi pada bulan Maret 2006



berasal dari kelompok komoditi bahan makanan, kelompok komoditi makanan jadi, minuman, rokok & tembakau serta kelompok komoditi kesehatan dimana kelompok komoditi tersebut menyumbang masing-masing 1,76% dan 0,93% dan 0,56%.

Selama triwulan I-2006, pergerakan inflasi menunjukkan trend negatif yaitu Januari sebesar 1,32%, Februari 0,10% dan Maret -0,75%. Terjadinya deflasi pada bulan Maret 2006 disebabkan turunnya indeks harga kelompok bahan makanan, kelompok sandang dan kelompok pendidikan, rekreasi dan olah raga masing-masing 3,02%, 0,34% dan 0,17%. Dari kelompok bahan makanan, pada bulan Maret 2006 tercatat hanya sub kelompok ikan yang diawetkan mengalami kenaikan yaitu sebesar 1,92%. Sebaliknya sembilan sub kelompok lainnya mengalami penurunan, yaitu sub kelompok padi-padian, umbi-umbian dan hasilnya 2,06%, daging dan hasilnya 2,83%, ikan segar 1,08%, telur, susu dan hasilnya 1,51%, sayur-sayuran 11,74%,

kacang-kacangan 0,06%, buah-buahan 3,77%, bumbu-bumbuan 3,44% serta lemak dan minyak 0,54%. Sedangkan sub kelompok bahan makanan relatif stabil dibandingkan bulan Februari 2006. Kelompok sandang tercatat mengalami penurunan sebesar 0,34% dan memberikan andil deflasi bulan Maret 2006 sebesar 0,01%. Kelompok pendidikan, rekreasi dan olah raga mengalami penurunan sebesar 0,17% pada Maret 2006 sebagai dampak dari penurunan indeks harga sub kelompok rekreasi yang mengalami penurunan sebesar 0,54%.

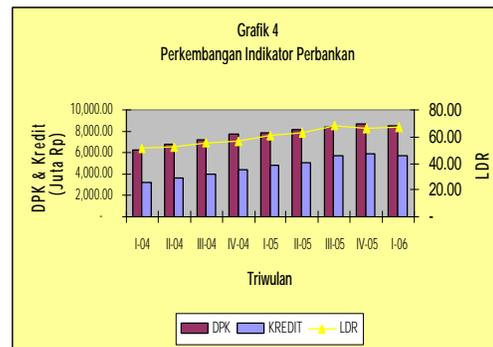
Perkembangan Perbankan dan Sistem Pembayaran

Kinerja perbankan pada triwulan I-2006 relatif membaik

Produk perbankan pada triwulan I-2006 di Provinsi Kepulauan Riau secara umum mengalami penurunan secara kuantitas. Hal ini terlihat pada beberapa indikator antara lain total aset, penyaluran kredit dan Dana Pihak Ketiga (DPK) masing-masing mengalami penurunan sebesar Rp.0,11 triliun untuk total aset dan penyaluran kredit serta Rp.0,15 triliun untuk DPK. Namun kualitas kredit dan jumlah jaringan kantor mengalami peningkatan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

NPL menurun dari 6,01% pada triwulan IV-2005 menjadi 5,75% pada triwulan laporan

Penurunan kuantitas produk perbankan di Provinsi Kepri pada Tw.I-2006 tidak diikuti dengan penurunan kinerja perbankan, sebaliknya mengalami perbaikan sebagaimana tertera pada indikator kualitas kredit perbankan Provinsi Kepulauan Riau yang mengalami perbaikan kinerja dengan rasio Non Performing Loan (NPL) gross pada triwulan laporan sebesar 5,75% menurun dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 6,01%.



Fungsi intermediasi perbankan tidak mengalami perubahan secara signifikan dibandingkan triwulan sebelumnya (q-t-q) dimana *Loan to Deposit Ratio* tercatat dari 67,50% pada triwulan IV-2005 menjadi 67,48% pada triwulan I-2006.

Penyaluran Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) turun sebesar Rp 0,44 triliun atau 14,15% dari Rp.3,11 triliun pada triwulan IV-2005 menjadi Rp 2,67 triliun pada triwulan I-2006.

Jaringan kantor bank mengalami peningkatan sebanyak 3 Kantor Cabang (KC) baru yaitu PT. Bank Artha Graha Internasional Tbk. di Batam, PT. Bank Muamalat Indonesia dan PT. Bank Riau Syariah di Tanjung Pinang. Sementara itu Kantor Cabang Pembantu (KCP) bertambah 2 buah, Kantor Kas (KK) bertambah 9 buah dan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) bertambah sebanyak 12 buah. Seiring dengan kepindahan ibukota Provinsi Kepri ke Tanjung Pinang tercatat 2 bank telah mengajukan izin pembukaan KC/KCP yaitu PT. Bank Panin dan PT. Bank Mega serta 1 BPR yaitu PD BPR Bintan.

Pada triwulan I-2006, KBI Batam net outflow sebesar 129,72 miliar

Kegiatan pembayaran tunai melalui kas menunjukkan peningkatan sedangkan transaksi non tunai melalui kliring dan BI-RTGS cenderung turun pada triwulan laporan. Transaksi tunai menunjukkan jumlah uang masuk (*inflow*) pada triwulan I-2006 sebesar Rp 804,04 miliar sedangkan uang keluar (*outflow*) sebesar Rp 933,75 miliar. Selisih posisi kas inflow dan outflow tersebut, menunjukkan posisi *net outflow* sebesar Rp 129,72 miliar. Sementara itu jumlah PTTB pada uang yang tidak layak edar dan uang yang dicabut dari peredaran mencapai sebesar Rp 204,92 miliar.

Rasio uang palsu terhadap inflow KBI sebesar 0,0003%

Temuan uang palsu pada triwulan I-2006 sebanyak 25 lembar atau sebesar Rp 2,06 juta. Rasio temuan uang palsu terhadap inflow KBI Batam tercatat angka sebesar 0,0003%. Pecahan uang yang paling banyak dipalsukan adalah pecahan Rp 100.000,00 Tahun Emisi 1999 yaitu sebanyak 17 lembar (0,68%) dan pecahan Rp 50.000,00 Tahun Emisi 1999 sebanyak 3 lembar (0,12%).

Transaksi melalui Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS) di KBI Batam turun dibandingkan triwulan sebelumnya. Transaksi outgoing turun 5,15% (q-t-q) dari Rp 4,49 triliun menjadi Rp 4,26 triliun. Demikian juga dengan transaksi incoming turun 30,85% (q-t-q) dari Rp 3,89 triliun menjadi Rp 2,69 triliun. Penurunan nominal incoming dan outgoing tersebut diikuti dengan turunnya jumlah warkat setiap transaksi tersebut.

Transaksi melalui kliring turun

Lalu lintas pembayaran non tunai melalui kegiatan kliring mengalami penurunan 3,98% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yaitu dari Rp 2,26 triliun pada triwulan IV-2005 menjadi Rp 2,17 triliun pada triwulan I-2006. Demikian juga dengan jumlah warkat yang turun sebesar 2,77% dibandingkan triwulan sebelumnya dari 150.400 lembar menjadi 146.241 lembar. Rasio nominal terhadap jumlah lembar pada triwulan laporan sebesar Rp 14,83 juta.

PVA bertambah menjadi 89 buah

Jumlah Pedagang Valuta Asing (PVA) yang melakukan kegiatan usaha di wilayah kerja KBI Batam sampai dengan triwulan I-2006 sebanyak 89 PVA dimana terdapat peningkatan sebanyak 2 PVA dibandingkan dengan triwulan IV-2005. Dari jumlah tersebut terdapat 6 PVA yang menghentikan sementara kegiatan usahanya lebih disebabkan oleh penurunan jumlah wisatawan dan kegiatan bisnis yang terkait.

**RINGKASAN EKSEKUTIF
INDIKATOR EKONOMI DAN MONETER TRIWULANAN
WILAYAH KERJA KANTOR BANK INDONESIA BATAM**

INDIKATOR	2003				2004				2005				2006
	Trw I	Trw II	Trw III	Trw IV	Trw I	Trw II	Trw III	Trw IV	Trw I	Trw II	Trw III	Trw IV	Trw I
MAKRO													
Laju Inflasi (q-t-q)	2.07	-0.95	0.75	2.35	0.47	1.10	0.70	1.89	2.65	0.39	1.52	9.6	0.66
IHK Bahan Makanan	-1.53	-5.32	-1.03	7.35	-0.16	-0.34	0.83	3.18	3.78	0.05	2.21	10.3	1.76
IHK Makanan Jadi	6.95	-0.27	1.09	0.79	0.14	0.45	0.89	4.99	1.52	1.12	0.69	5.98	0.93
IHK Perumahan	3.12	1.70	0.46	1.05	0.27	1.07	0.52	0.32	0.70	0.24	1.46	4.38	0.14
IHK Sandang	0.26	-1.15	1.45	3.36	-0.01	0.43	0.54	1.25	1.00	1.09	2.65	1.76	0.22
IHK Kesehatan	0.62	5.68	1.82	-0.49	-0.01	1.84	-0.12	0.07	0.67	1.17	1.3	1.46	0.56
IHK Pendidikan	0.28	-0.33	7.91	0.15	0.05	0.65	1.11	0.34	0.07	0.14	6.98	0.63	-0.24
IHK Transport	2.19	-0.14	0.00	0.00	0.19	4.44	0.69	0.04	7.20	0.03	0.03	23.06	0.10
Pertumbuhan PDRB	2.14	1.41	2.06	1.99	1.86	1.11	0.73	0.36	*	2.22	2.41	1.71	1.42
Ekspor (RibU USD)	1,110,161	1,000,002	1,229,359	1,248,603	1,077,826	925,490	1,259,378	762,606	940,773	1,618,970	1,282,820	1,307,957	1,331,007
Impor (RibU USD)	465,893	35,799	16,862	34,098	99,729	125,456	10,980	212,948	91,954	260,646	332,178	354,964	228,037
PERBANKAN													
Deposito (miliar Rp)	1,452.45	1,329.15	1,438.21	1,439.15	1,328.99	1,270.24	1,408.87	1,446.24	1,616.15	1,805.53	2,070.99	2,169.29	2,302.86
Giro (miliar Rp)	1,996.06	2,181.32	2,328.63	2,404.28	2,397.72	2,745.92	2,860.73	2,839.40	3,106.07	3,183.28	3,262.74	3,524.56	3,429.73
Tabungan (miliar Rp)	1,959.85	2,041.54	2,190.14	2,542.28	2,536.22	2,742.02	2,900.97	3,016.97	3,084.28	3,132.15	3,040.04	3,013.30	2,819.91
DPK (miliar Rp)	5,408.36	5,552.01	5,956.98	6,395.71	6,262.93	6,758.18	7,170.59	7,302.61	7,806.50	8,120.96	8,373.78	8,707.15	8,552.50
Total Asset (miliar Rp)	6,165.65	6,330.12	6,667.26	7,310.10	7,152.30	7,787.04	8,263.39	8,440.49	9,316.23	9,715.10	10,213.91	10,666.45	10,559.53
Kredit Umum (miliar Rp)	2,159.81	2,450.28	2,714.74	2,302.09	2,413.38	3,564.40	3,962.75	4,141.66	4,761.13	5,104.37	5,685.47	5,877.40	5,771.56
KUK (miliar Rp)	828.15	880.12	781.42	744.99	765.80	776.10	780.06	778.51	794.30	787.40	757.98	1394.67	733.61
Suku Bunga Kredit (rata2 tertimbang)	17.99%	17.48%	16.78%	15.45%	15.13%	15.39%	15.60%	15.26%	16.69%	21.61%	13.84%	16.31%	15.58%
Suku Bunga Dep 3 bln (rata2 tertmbng)	11.51%	10.52%	9.10%	8.13%	7.23%	6.46%	6.37%	6.26%	6.50%	6.78%	6.94%	9.89%	10.20%
LDR (%)	39.93%	44.13%	45.57%	47.72%	50.76%	52.74%	55.26%	56.71%	60.99%	62.85%	67.90%	67.50%	61.62%
NIM (%)	-0.16%	0.05%	1.00%	2.45%	1.42%	2.83%	3.99%	4.84%	1.47%	2.76%	3.77%	4.83%	1.21%
NPL (%)	3.03%	5.09%	3.42%	2.37%	3.68%	4.10%	3.94%	3.34%	2.72%	4.12%	5.15%	6.01%	6.17%
SISTEM PEMBAYARAN													
Inflow (miliar Rp)	480.66	348.81	361.07	434.73	482.27	411.59	484.41	538.76	640.23	544.74	499.38	789.7	804.04
Outflow (miliar Rp)	475.31	546.27	639.65	1,033.53	581.28	891.15	838.26	1,339.74	926.99	999.53	1,013.85	1,234.96	933.75
PTTB (miliar Rp)	316.26	180.58	177.3	177.04	260.29	312.12	413.45	308.78	409.23	252.3	133.24	103.82	204.92
Nominal Uang Palsu	400,000	320,000	1,680,000	560,000	775,000	1,170,000	830,000	2,390,000	3,400,000	1,810,000	985,000	1,305,000	2,060,000
Jumlah uang palsu (lembar)	9	7	34	11	13	15	12	43	62	32	14	18	25
Volume Kliring (lembar)	124,504	131,251	138,377	135,819	136,461	140,276	145,620	145,176	144,005	154,879	157,535	150,400	146,241
Nominal Kliring (miliar Rp)	1,783.88	1,629,237	1,843,390	1,908,215	1,888,256	1,914,133	2,062,812	2,151,372	2,054,496	2,208,473	2,371,965	2,258,818	2,168.74
KEUANGAN DAERAH													
Pendapatan Asli Daerah (miliar Rp)	14.59	13.52	14.01	8.29	11.43	12.62	13.85	17.82	14.46	29.03	0	0	18.81
Dana Alokasi Umum (miliar Rp)	27.00	16.11	21.74	56.59	26.05	26.05	26.05	17.37	20.97	12.76	0	0	37.30
Dana Alokasi Khusus (miliar Rp)	0	0	0.99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Data Ekspor & Impor, sumber PDIE Jakarta

Ket: *) Data diperbaiki

Bab 1

Perkembangan Ekonomi Makro Provinsi Kepulauan Riau

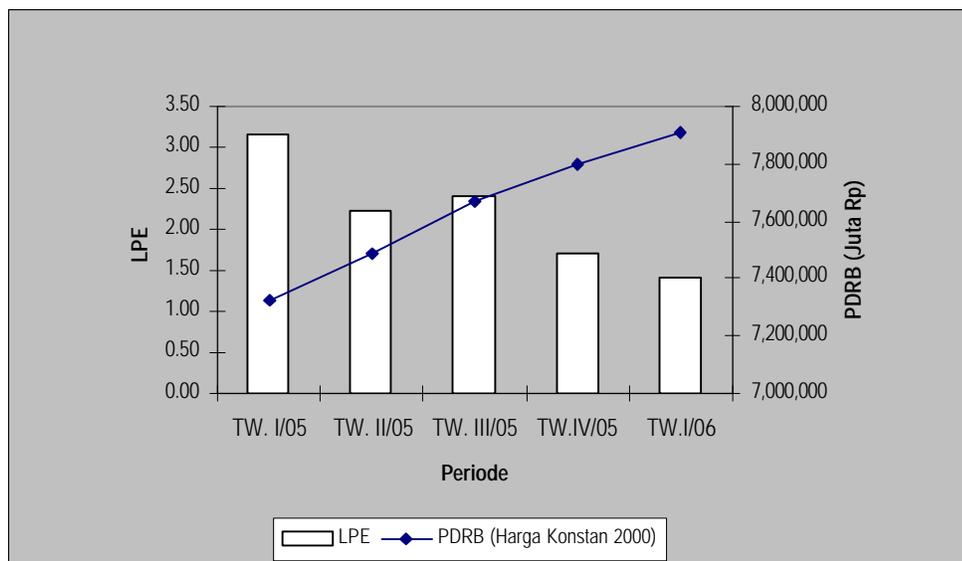
1.1 KONDISI UMUM

Pertumbuhan perekonomian Provinsi Kepulauan Riau dengan tahun dasar (*base year*) tahun 2000 atas dasar harga berlaku selama Triwulan I tahun 2006 diperkirakan meningkat sebesar 2,71% dibandingkan Triwulan I tahun 2005, sedangkan pertumbuhan atas dasar harga konstan untuk Triwulan I tahun 2006 diperkirakan sebesar 1,42% sedikit lebih rendah dibandingkan pertumbuhan pada Triwulan IV tahun 2005 yang tercatat sebesar 1,71%.

Kontribusi terbesar pada peningkatan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau pada Triwulan I tahun 2006 apabila dibandingkan dengan Triwulan IV tahun 2005, dalam pembentukan pendapatan regional terletak pada sektor industri dibandingkan dengan sektor lain yaitu sebesar 60%, walaupun hanya tumbuh sebesar 1,17%. Sektor industri masih merupakan sektor unggulan utama diikuti oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor pertambangan.

Grafik 1.1

Perkembangan PDRB (Rp Juta) dan LPE Triwulanan



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) – Provinsi Kepulauan Riau

Berdasarkan grafik 1.1, perkembangan PDRB Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan harga konstan terus mengalami pertumbuhan sedangkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

berfluktuasi dengan kecenderungan menurun. Pertumbuhan perekonomian daerah yang secara triwulanan mengalami perlambatan disebabkan adanya penurunan berbagai kegiatan perekonomian kecuali kegiatan dalam pembentukan modal tetap bruto dan kegiatan ekspor. Melemahnya daya beli masyarakat akibat kenaikan Bahan Bakar Minyak, terbatasnya anggaran pemerintah daerah dan tingginya tingkat suku bunga serta menurunnya kegiatan investasi mengakibatkan perlambatan laju pertumbuhan ekonomi pada konsumsi pengeluaran rumah tangga, lembaga swasta nirlaba, konsumsi pemerintah dan kegiatan impor.

Laju pertumbuhan sektoral PDRB Provinsi Kepulauan Riau menurut lapangan usaha dapat dilihat pada tabel 1.1, sementara nilai PDRB Provinsi Kepulauan Riau atas dasar harga konstan 2000 terdapat pada tabel 1.2

Tingkat PDRB Provinsi Kepulauan Riau pada triwulan I-2006 (Tabel 1.2) sebesar Rp.7.912.010,71 juta dimana jumlah terbesar terdapat pada sektor industri (Rp.5.342,55 miliar), perdagangan, hotel, restoran (Rp.630,61 miliar), diikuti oleh komponen pertambangan (Rp.524,70 miliar).

Tabel 1.1
Pertumbuhan PDRB Provinsi Kepri
Menurut Lapangan Usaha

Lapangan Usaha	2005				2006
	Tw. I *)	Tw. II	Tw. III	Tw. IV	Tw.I
1. Pertanian	3,06	0,96	7,37	-2,17	7,03
2. Pertambangan	1,94	0,21	3,04	-1,31	0,21
3. Industri	3,87	2,86	1,92	2,31	1,17
4. Listrik, gas, air	0,98	2,84	1,14	3,09	0,50
5. Bangunan	1,88	1,67	4,71	2,08	2,43
6. Perdag,Htl,Rest	2,77	1,28	1,83	-0,44	0,35
7. Pengkt & komunks	2,23	3,07	4,92	3,83	2,65
8. Keuangan	1,34	-1,09	2,49	3,31	1,90
9. Jasa	1,54	1,23	0,75	1,45	0,78
PDRB	3,17	2,22	2,41	1,71	1,42

Sumber : BPS - Provinsi Kepulauan Riau

*) harga konstan '93

Tabel 1.2
PDRB Provinsi Kepulauan Riau Atas Dasar Harga Konstan 2000
Menurut Lapangan Usaha

(1=Rp 1 juta)

Lap. Usaha	2005					2006
	Tw.1	Tw.2	Tw.3	Tw.4	Total	Tw.1
1. Pertanian	333.331,80	336.520,88	361.306,57	353.467,25	1.463.152,82	378.314,54
2. Pertambangan	513.779,96	514.874,68	530.515,95	523.590,30	2.082.760,89	524.705,03
3. Industri	4.923.237,99	5.064.164,01	5.161.245,41	5.280.709,94	20.429.357,36	5.342.551,90
4. Listrik, gas, air	16.971,43	17.454,17	17.652,93	18.197,85	70.276,39	18.288,26
5. Pangunan	187.767,28	190.907,00	199.906,19	204.073,75	782.654,21	209.025,45
6. Perdag.htl,rest	611.923,30	619.780,77	631.136,96	628.386,04	2.491.227,07	630.612,82
7. Pengkt.& Komunikasi	265.422,85	273.572,82	287.039,59	298.041,42	1.124.076,68	305.931,92
8. Keuangan	329.789,12	326.188,13	334.297,46	345.351,12	1.335.625,83	351.905,08
9. Jasa	144.507,06	146.278,11	147.375,25	149.507,54	587.667,95	150.675,71
PDRB	7.326.730,78	7.489.740,57	7.670.476,32	7.801.325,21	30.366.799,20	7.912.010,71

Sumber : Badan Pusat Statistik - Provinsi Kepulauan Riau

Sementara itu, tingkat PDRB Provinsi Kepulauan Riau menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku dapat dilihat pada tabel 1.3. Sektor industri pengolahan masih menjadi komponen terbesar yang mencapai Rp 6,438 triliun.

Tabel 1.3
PDRB Provinsi Kepri Menurut Lapangan Usaha
atas dasar harga berlaku

(1=Rp 1 juta)

Lapangan Usaha	2005					2006
	Tw.1	Tw.2	Tw.3	Tw.4	Total	Tw.1
1. Pertanian	523.813,54	527.493,85	575.444,60	555.568,45	2.182.320,45	578.142,99
2. Pertambgn&Penggalian	865.919,07	962.131,50	1.092.582,76	1.156.387,99	4.077.021,31	1.181.518,99
3. Industri Pengolahan	5.649.754,42	5.906.613,08	6.054.262,36	6.279.602,23	23.890.232,08	6.438.488,32
4. Listrik,Gas&Air Bersih	30.208,07	31.935,93	32.290,14	33.189,26	127.623,40	33.890,98
5. Bangunan	342.521,88	371.673,29	394.801,83	418.751,16	1.527.748,16	453.158,26
6. Perdagangan,Htl&Rest	800.279,27	847.551,34	882.370,30	889.098,39	3.419.299,30	893.056,24
7. Pengangk&kommnks	365.587,93	380.556,16	401.163,46	417.671,42	1.564.978,97	435.870,58
8. Keu.Persewaan&Jasa Prshn	540.075,51	549.899,67	575.161,37	595.083,02	2.260.219,57	611.498,39
9. Jasa-jasa	213.652,64	226.390,87	237.822,83	248.315,96	926.182,30	254.733,83
PDRB	9.331.812,34	9.804.245,68	10.245.899,66	10.593.667,88	39.975.625,55	10.880.358,58

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau

Komponen industri pengolahan merupakan komponen penyumbang terbesar terhadap pembentukan tingkat PDRB Provinsi Kepulauan Riau selama ini. Pada triwulan I-2006, komponen tersebut memberikan sumbangan sebesar 59,18% pada tingkat PDRB Provinsi Kepulauan Riau dan sedikit mengalami penurunan sebesar 0,10% dibandingkan Triwulan IV-2005. Nilai ini dapat dilihat pada tabel 1.4.

Tabel 1.4
Distribusi PDRB Provinsi Kepulauan Riau Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2005 – 2006Q1

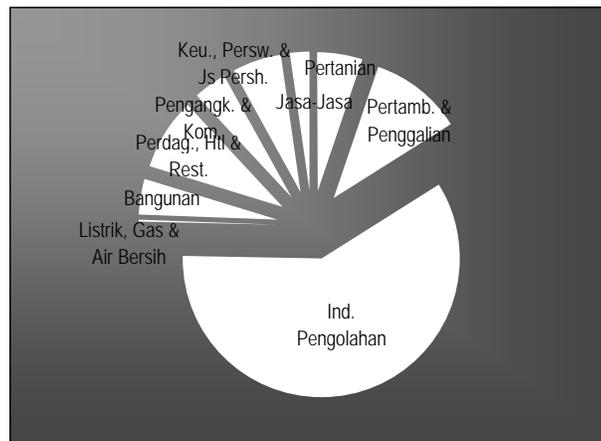
dalam persen(%)

KOMPONEN	2005				2006
	Tw. I	Tw. II	Tw. III	Tw. IV	
1. Pertanian	5,61	5,38	5,62	5,24	5,31
2. Pertamb&Penggalian	9,28	9,81	10,66	10,92	10,86
3. Industri Pengolahan	60,54	60,25	59,09	59,28	59,18
4. Listrik,Gas&Air bersh	0,32	0,33	0,32	0,31	0,31
5. Bangunan	3,67	3,79	3,85	3,95	4,16
6. Perdag,Htl&Rest	8,58	8,64	8,61	8,39	8,21
7. Pengangk&Komunik	3,92	3,88	3,92	3,94	4,01
8. Keu,Persewn&JsaKeu	5,79	5,61	5,61	5,62	5,62
9. Jasa-jasa	2,29	2,31	2,32	2,34	2,34
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Batam

Komponen industri pengolahan menjadi penyumbang terbesar terhadap pembentukan tingkat PDRB Provinsi Kepulauan Riau (59,18%) yang seluruhnya diberikan oleh industri non migas, diikuti oleh pertambangan (10,86%) serta perdagangan, hotel & restoran (8,21%) dimana kontribusi terbesar diberikan oleh komponen perdagangan besar dan eceran sebesar (7,08%). Angka ini dapat dilihat pada grafik 1.2.

Grafik 1.2
Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Triwulan I-2006



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Batam

1.2 KETENAGAKERJAAN

Berdasarkan data yang tercatat pada Disnaker Kota Batam sampai dengan bulan Maret 2006, terdapat sebanyak 231.490 tenaga kerja sektor formal dimana terdapat peningkatan sebesar 3,17% dibandingkan posisi Desember 2005. Secara umum, peningkatan jumlah tenaga kerja mengindikasikan bahwa daya serap lapangan usaha diluar sektor pertanian, pertambangan, listrik, gas & air bersih terhadap penyediaan lapangan kerja masih terbuka. Sebanyak 177.951 pekerja atau 76,87% bekerja di sektor industri, sedangkan sektor bangunan dan sektor perdagangan, hotel dan restoran memberikan kontribusi masing-masing sebesar 8,51% dan 7,17%. Fakta dimaksud menggambarkan bahwa kebijakan Pemerintah Pusat dan daerah dalam hal meningkatkan jumlah investasi selain di sektor unggulan utama di pulau Batam perlu ditingkatkan sehingga berdampak pada peningkatan PDRB yang pada akhirnya memberi peluang pada penciptaan lapangan kerja baru.

Perkembangan jumlah tenaga kerja Kota Batam posisi Maret 2006 dapat dilihat pada tabel 1.5

Tabel 1.5
Perkembangan Jumlah Tenaga Kerja Kota Batam

(1=1 orang)

Sektor	Des 2005	Maret 2006						WNI + WNA
		WNI			WNA			
		L	P	L+P	L	P	L+P	
a. Pertanian	1.760	1.818	192	2.010	-	-	-	2.010
b. Pertambangan & Penggalan	737	489	241	730	5	-	5	735
c. Industri	173.772	55.411	119.870	175.281	2.538	132	2.670	177.951
d. Listrik, Gas & Air Bersih	1.225	1.035	186	1.221	4	-	4	1.225
e. Bangunan	19.023	18.386	1.316	19.702	4	-	4	19.706
f. Perdag, Hotel & Rest	16.314	12.174	4.264	16.555	47	-	47	16.602
g. Pengangk & Komnks	3.033	1.500	1.475	2.975	32	-	32	3.007
h. Keu, Jasa Persewaan & Pershan	2.536	2.041	626	7.561	-	-	-	2.667
i. Jasa-jasa	6.009	5.669	1.892	5.714	21	5	26	7.587
	224.379	98.523	130.179	228.702	2.651	137	2.788	231.490

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Batam

1.3 PENANAMAN MODAL

Pengembangan kota Batam sejak awal diarahkan kepada sektor perindustrian yang didukung dengan beberapa fasilitas kemudahan atau insentif berupa bebas bea masuk yang dikenal dengan kawasan *bonded zone*. Faktor letak geografis kota Batam yang sangat strategis serta potensi kota Batam kedepannya merupakan faktor penunjang dalam menggerakkan minat investasi baik Penanaman Modal Dalam Negeri maupun Penanaman Modal Asing. Perkembangan rencana investasi asing (PMA) di Batam sampai dengan posisi Februari 2006 dapat dilihat pada tabel 1.6

Tabel 1.6

Perkembangan Rencana Investasi Asing (PMA) di Batam *)

Periode	2005		2006	
	Jml Perusahaan Baru	Nilai (US\$ *)	Jml Perusahaan Baru	Nilai (US\$ *)
1. Januari	5	3.705.000	6	7.435.000
2. Februari	6	37.976.667	8	7.550.000
Jumlah	11	41.726.667	21	14.985.000

Sumber : Subdit BKPM Badan Otorita Batam

*)Termasuk perluasan usaha

Jumlah perusahaan penanaman modal asing di Kota Batam selama periode Januari s/d Februari 2006 meningkat cukup signifikan sebesar 90,90% atau meningkat sebanyak 10 perusahaan dibandingkan periode yang sama tahun 2005. Peningkatan jumlah PMA tersebut tidak secara langsung mempengaruhi nilai investasi dimana nilai investasi yang direncanakan (termasuk perluasan usaha) justru mengalami penurunan dari sebesar US\$ 41,73 juta pada periode Januari s/d Februari 2005 menjadi sebesar US\$ 14,99 juta atau turun sebesar 29,75% pada periode yang sama tahun 2006.

Wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang didalamnya termasuk Kota Batam memiliki karakteristik utama dibandingkan Provinsi lain di Indonesia sebelum diberlakukannya Peraturan Pemerintah No.63 tahun 2004 tentang PPN Barang Mewah, salah satunya adalah perkembangan daerah yang diarahkan pada sektor industri. Setelah diberlakukannya PP tersebut secara efektif ternyata memberikan dampak ekonomis pada kegiatan investasi di wilayah Kepulauan Riau karena dipandang tidak memberikan nilai tambah bagi perkembangan investasi dan perdagangan.

Keluarnya Peraturan Menteri Keuangan No.60/PMK.04/2005 tanggal 21 Juli 2005 tentang Tempat Penimbunan Sementara (TPS) di Pulau Batam, Bintan dan Karimun memberikan angin segar sebagai salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mendukung peningkatan kegiatan perdagangan dan industri di wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Beberapa fasilitas dan kemudahan yang ditawarkan dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan tersebut, diantaranya adalah : 1) Kemudahan di bidang perizinan pendirian kawasan berikat, 2) Kemudahan prosedur kepabeanan, 3) Fasilitas perpajakan dan kepabeanan, 4) Fasilitas perdagangan, maka diharapkan dapat menarik investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia khususnya di wilayah Batam, Bintan dan Karimun.

Namun bila kita bercermin pada data-data perkembangan jumlah investasi asing yang masuk ke wilayah Kota Batam maka terlihat bahwa jumlah perusahaan baru yang berdiri meskipun meningkat bila dibandingkan tahun lalu, namun dari sisi nilai investasi termasuk perluasan usaha cenderung menurun. Oleh karena itu perlu dikaji lebih lanjut mengenai efektivitas pemberlakuan

Bonded Zone Plus tersebut apakah sistem tersebut sudah tepat diterapkan di wilayah Batam atau terdapat sistem lain yang lebih efektif untuk menarik investor asing sesuai dengan kebutuhan dan minat calon investor.

1.4 PARIWISATA

Jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Batam pada periode Januari s/d Maret 2006 mencapai 235.563 orang dan mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama tahun 2005 yang tercatat sebanyak 290.771 orang atau menurun sebesar 18,99%. Kecenderungan penurunan jumlah wisatawan mancanegara ke Kota Batam selama tahun 2006 ini patut menjadi perhatian khususnya bagi Pemerintah Daerah, dimana sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang dapat dimanfaatkan untuk mengoptimalkan nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Oleh karena itu, perlu dilakukan berbagai macam upaya untuk menggali sektor-sektor pariwisata di wilayah Provinsi Kepulauan Riau mengingat terdapat beberapa keunggulan yang dimiliki daerah antara lain: letak wilayah yang strategis dan berdekatan dengan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia, kebudayaan-kebudayaan daerah yang ada dan perlu dilestarikan, kekayaan dan keindahan alam yang bila dikelola secara optimal maka diharapkan mampu menarik minat wisatawan mancanegara untuk berkunjung ke Provinsi Kepulauan Riau. Disamping itu, dikenalnya Kota Batam dan wilayah sekitarnya sebagai daerah yang memiliki kawasan golf dengan kualitas internasional juga menjadi salah satu faktor pendukung disamping fasilitas dan regulasi yang berlaku.

Salah satu kelemahan dalam meningkatkan sektor pariwisata di Provinsi Kepulauan Riau saat ini adalah kurangnya informasi dan promosi yang dilakukan sehingga tidak banyak masyarakat internasional maupun nasional mengetahui tentang keunggulan daerah. Untuk itu perlu ditingkatkan hubungan kerjasama dengan berbagai pihak baik di dalam negeri maupun luar negeri untuk dapat mempromosikan dan menyebarluaskan informasi daerah. Dengan berkembangnya sektor pariwisata yang didukung oleh peningkatan kunjungan wisatawan ke wilayah Provinsi Kepulauan Riau maka akan mempengaruhi perekonomian daerah serta diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Perkembangan jumlah wisatawan mancanegara ke pulau Batam dapat dilihat pada tabel 1.7

Tabel 1.7
Perkembangan Jumlah Kunjungan
Wisatawan Mancanegara ke Kota Batam

(1=1 orang)

Periode	2003	2004	2005	2006
(1)	(4)	(5)	(6)	(6)
1. Januari	96.518	126.168	124.169	82.584
2. Februari	103.614	123.263	83.677	69.254
3. Maret	96.256	134.119	82.928	83.725
TRIWULAN I	296.388	383.550	290.771	235.563
1. April	64.421	90.409	79.967	
2. Mei	82.868	122.141	90.924	
3. Juni	101.245	142.557	90.828	
TRIWULAN II	248.534	355.107	261.719	
1. Juli	113.099	134.233	87.022	
2. Agustus	123.474	142.490	77.993	
3. September	117.123	129.662	76.547	
TRIWULAN III	353.696	406.385	261.562	
1. Oktober	127.552	126.868	69.793	
2. November	121.684	106.377	68.539	
3. Desember	135.942	148.844	NA	
TRIWULAN IV	385.178	382.089	138.332	
JUMLAH	1.284.563	1.527.131	933.665	

Sumber : BPS Kota Batam (data olahan dari Kantor Imigrasi-Batam)

Selama periode Januari s/d Maret 2006 jumlah Wisatawan asal Singapura masih menduduki posisi terbesar yang mengunjungi pulau Batam dengan kontribusi sebesar 63,70% dari jumlah wisatawan asing seluruhnya, diikuti oleh wisatawan asal Malaysia, Korea Selatan, Jepang dan Inggris dengan kontribusi masing-masing sebesar 12,91%, 9,54%, 2,76% dan 1,06%. Hal ini disebabkan karena letak geografis negara Singapura dan Malaysia yang relatif dekat dengan Batam, disamping sarana transportasi yang relatif mudah dan murah serta waktu tempuh yang cukup singkat. Namun demikian dari sisi jumlah wisatawan asal Singapura telah terjadi penurunan pada periode Januari s/d Maret 2006 sebesar 30,81% yaitu dari 216.885 orang pada periode yang sama tahun 2005 menjadi 150.052.

Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke pulau Batam berdasarkan asal negara dapat dilihat pada [tabel 1.8](#)

Tabel 1.8
Perkembangan Negara Asal Kunjungan
Wisatawan Mancanegara ke Batam

(1=1 orang)

Kebangsaan	2005			2006			
	Januari	Februari	Maret	Januari	Februari	Maret	Jumlah
1. Singapura	96.276	60.174	60.443	53.436	41.637	54.979	150.052
2. Malaysia	13.513	10.174	10.033	9.883	9.664	10.872	30.419
3. Korea Selatan	3.232	4.392	3.805	7.953	7.483	7.040	22.476
4. Jepang	2.093	1.908	1.687	2.042	2.193	2.265	6.500
5. Inggris	929	926	775	872	828	790	2.490
6. Amerika Serikat	674	585	632	618	680	639	1.937
7. Taiwan	486	508	406	485	447	331	1.263
8. Australia	583	520	649	542	520	542	1.604
9. Jerman	203	218	606	199	210	225	634
10. Belanda	134	125	115	154	121	148	423
11. Lainnya	4.044	4.147	3.784	6.400	5.471	5.894	17.765
Jumlah	124.169	83.677	82.925	82.584	69.254	83.725	235.563

Sumber : BPS Kota Batam (Data olahan dari Kantor Imigrasi Batam)

1.5 PEDAGANG VALUTA ASING (PVA) BUKAN BANK

Sampai dengan Triwulan I-2006 terdapat 89 PVA yang melakukan kegiatan operasional di wilayah kerja Kantor Bank Indonesia Batam, yaitu di: Kota Batam sebanyak 63 PVA, Kota Tanjung Pinang sebanyak 12 PVA, Kab. Tanjung Balai Karimun sebanyak 9 PVA, Tanjung Uban sebanyak 3 PVA, dan Tanjung Batu sebanyak 2 PVA. Jumlah PVA di wilayah kerja KBI Batam merupakan jumlah ketiga terbesar di Indonesia setelah Jakarta dan Denpasar. Banyaknya PVA bukan bank dimungkinkan karena kemudahan perizinan, banyaknya wisatawan, letak geografis Kota Batam yang dekat dengan wilayah negara lain yaitu Singapura, Malaysia, Thailand, serta banyaknya PMA yang beroperasi.

Perkembangan jumlah transaksi jual beli valuta asing pada Triwulan I-2006 rata-rata mengalami peningkatan dibandingkan Triwulan IV-2005 yaitu, untuk transaksi pembelian valuta SGD meningkat 54,34% dari SGD 29.003.540,76 menjadi SGD 44.765.070,53; dan valuta MYR meningkat 87,80% dari MYR 5.165.856,13 menjadi MYR 9.701.677,08; sedangkan valuta US\$ meningkat 36,02% dari USD 1.348.258,67 menjadi US\$ 1.833.957,00. Sementara itu, untuk transaksi penjualan mengalami peningkatan pada ketiga jenis mata uang dimana valuta USD meningkat 26,44% dari US\$ 1.475.078,58 menjadi US\$ 1.865.048,10, valuta SGD meningkat 48,77% dari SGD 30.205.936,94 menjadi SGD 44.936.797,44, valuta MYR meningkat 57,90% dari MYR 6.960.551,41 menjadi MYR 10.990.547,20.

Volume transaksi Uang Kertas Asing (UKA) pada Triwulan I-2006 mengalami peningkatan dibandingkan Triwulan IV-2005, berdasarkan data *positioning* UKA dengan membandingkan posisi jual dan posisi beli pada periode laporan, USD masing-masing mengalami posisi jual

(short) masing-masing sebesar USD 31.091,10; SGD 171.726,91 dan MYR 1.288.870,12. Indikator tersebut mengindikasikan bahwa permintaan masyarakat akan UKA tersebut disebabkan oleh kebutuhan baik untuk transaksi ekonomi maupun biaya perjalanan ke negara dimaksud.

1.6 PENDUDUK

Jumlah penduduk Kota Batam sampai dengan bulan Maret 2006 tercatat sebanyak 686.754 orang dimana terdapat peningkatan sebesar 0,14% terhadap Desember 2005 yang tercatat sebanyak 685.787 orang. Pertumbuhan ini lebih disebabkan oleh faktor migrasi yang sebagian besar pada kelompok usia kerja. Jumlah penduduk pada Triwulan I-2006 terdiri dari 333.671 orang laki-laki dan 353.083 orang perempuan.

Penyebaran penduduk di Kota Batam terkonsentrasi pada wilayah kecamatan Sei Beduk (179.396 orang), kecamatan Sekupang (143.289 orang), dan kecamatan Batu Ampar (128.405 orang), dimana persentase ketiga kecamatan tersebut masing-masing adalah sebesar 26,12%; 20,86%; dan 18,70%.

Untuk penyebaran penduduk di Kota Batam dapat dilihat pada tabel 1.9

Tabel 1.9
Penyebaran Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Kota Batam
Periode Maret 2006

(1=1 orang)

Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	%
1. Belakang Padang	10.021	9.783	19.802	2,88
2. Bulang	4.540	4.226	8.766	1,28
3. Galang	7.089	6.399	13.488	1,96
4. Sei Beduk	79.803	99.593	179.396	26,12
5. Nongsa	60.332	59.148	119.480	17,40
6. Sekupang	69.818	73.471	143.289	20,86
7. Lubuk Baja	38.071	36.055	74.126	10,79
8. Batu Ampar	63.997	64.408	128.405	18,70
Kota Batam	333.671	353.083	686.754	100,00

Sumber : Dinas Kependudukan Kota Batam

Bab 2

Perkembangan Inflasi

2.1 KONDISI UMUM

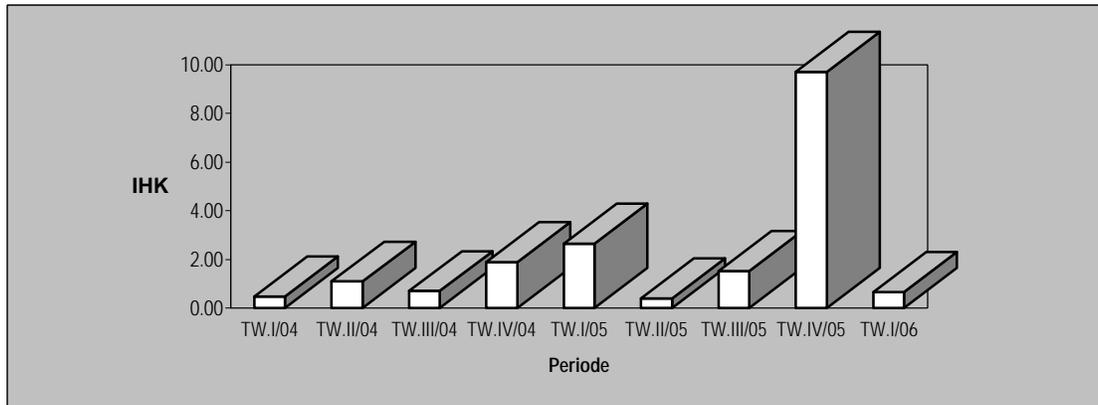
Kondisi IHK selama Kota Batam bulan Maret 2006 sebesar 127,57 sedangkan pada bulan Februari 2006 sebesar 128,53 yang berarti daerah ini mengalami deflasi sebesar 0,75%. Tingkat inflasi selama Triwulan I 2006 mencapai 0,66% jauh lebih rendah dibandingkan dengan Triwulan I tahun 2005.

Tingkat inflasi IHK Provinsi Kepri yang diwakili oleh Kota Batam masih lebih rendah bila dibandingkan dengan inflasi IHK di Pekanbaru dan nasional. Terjadinya deflasi sebesar 0,75% pada bulan Maret 2006 disebabkan turunnya indeks harga kelompok bahan makanan, kelompok sandang dan kelompok pendidikan, rekreasi dan olah raga masing-masing sebesar 3,02%, 0,34% 0,17%. Pengukuran laju inflasi Kota Batam adalah berdasarkan tingkat Indeks Harga Konsumen (IHK) pada 7 (tujuh) kelompok barang, dimana secara triwulanan (q-t-q) laju inflasi Kota Batam pada triwulan I-2005 mencapai 2,65%, mengalami perlambatan pada triwulan II-2005 yang mencapai 0,39%, kemudian meningkat menjadi 1,52% pada triwulan III-2005 dan 9,72% pada triwulan IV-2005, sementara pada Triwulan I-2006 mencapai 0,66%. Sementara itu, laju inflasi secara tahunan (y-o-y) Maret tahun 2005 terhadap Maret tahun 2006 sebesar 12,57% jauh lebih tinggi dibandingkan periode Maret 2005 terhadap Maret 2004 yang hanya sebesar 6,48%. Kenaikan yang sangat tinggi ini disebabkan adanya kenaikan bahan bakar minyak yang berdampak pada kenaikan komoditi lainnya pada periode ini.

Terjadinya deflasi pada bulan Maret 2006 sebesar 0,75% disebabkan turunnya indeks harga kelompok bahan makanan dimana tercatat 29 dari 54 komoditi bahan makanan mengalami penurunan harga dan 25 komoditi lainnya mengalami kenaikan harga. Dari 11 sub kelompok yang menyusun kelompok bahan makanan tercatat hanya sub kelompok ikan yang diawetkan yang mengalami kenaikan indeks pada bulan Maret 2006 yaitu sebesar 1,92%. Kelompok sandang pada bulan ini tercatat mengalami penurunan, yaitu sebesar 0,34% dan memberikan andil sebesar 0,01% terhadap pembentukan deflasi Kota Batam. Pada periode ini yang turut andil dalam pembentukan deflasi Kota Batam adalah kelompok pendidikan, rekreasi dan olah raga yang mengalami penurunan indeks sebesar 0,17% sebagai dampak dari penurunan indeks harga sub kelompok rekreasi yang mengalami penurunan sebesar 0,54%.

Grafik perkembangan laju inflasi Kota Batam terdapat pada [grafik 2.1](#)

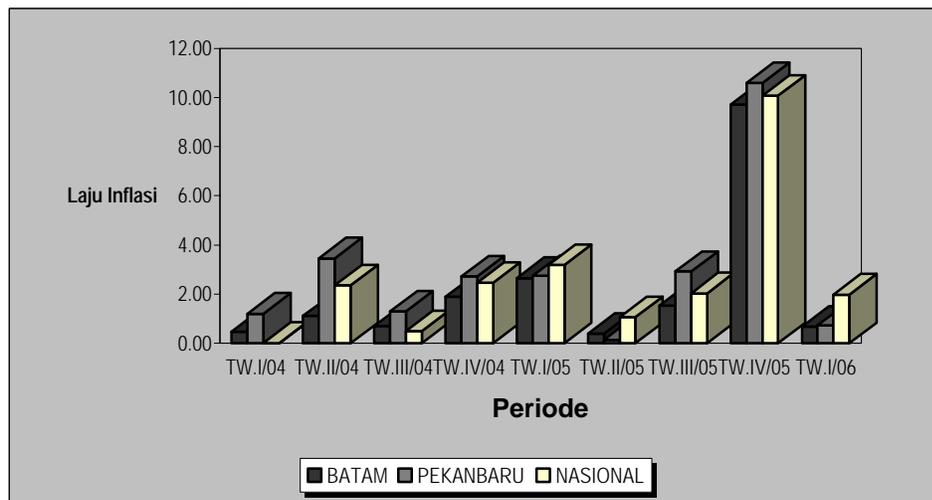
Grafik 2.1
Perkembangan Laju Inflasi Batam



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Batam

Pergerakan tingkat IHK di Provinsi Kepri, Pekanbaru dan Nasional mengalami pergerakan yang searah selama triwulan berjalan, dimana ketiganya mengalami perlambatan laju inflasi dibandingkan triwulan sebelumnya. Perkembangan inflasi Kota Batam, Pekanbaru dan Nasional dapat dilihat pada [grafik 2.2](#)

Grafik 2.2
Perkembangan Inflasi Kota Batam, Pekanbaru dan Nasional



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Batam

Perkembangan laju inflasi kota Batam selama Triwulan I-2006 dapat dilihat pada [Tabel 2.1](#)

Tabel 2.1
Perkembangan Inflasi Kota Batam

dalam persen (%)

Kelompok Pengeluaran	Tw.IV 2005	JAN	FEB	MAR	Tw. I 2006
Umum	9,60	1,32	0,10	(0,75)	0,67
1. Bahan Makanan	10,30	4,49	0,29	(0,32)	1,76
2. Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau	5,98	0,53	(0,01)	0,41	0,93
3. Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan Bakar	4,38	0,08	0,03	0,03	0,14
4. Sandang	1,76	0,31	0,25	(0,34)	0,22
5. Kesehatan	1,46	0,29	0,07	0,20	0,56
6. Pendidikan, Rekreasi dan Olah Raga	0,63	(0,07)	0,00	(0,17)	(0,24)
7. Transportasi, Komunikasi & Jasa Keuangan	23,06	0,02	0,00	0,08	0,10

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Batam

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa terdapat peningkatan laju inflasi pada beberapa komoditi selama triwulan I-2006, yaitu: kelompok kesehatan; kelompok makanan jadi, minuman, rokok & tembakau, sedangkan kelompok perumahan, air, listrik, gas & bahan bakar stabil dibandingkan indeks pada bulan Februari 2006. Sementara itu, kelompok bahan makanan; kelompok sandang; dan kelompok pendidikan, rekreasi & olah raga mengalami penurunan masing-masing sebesar (0,32%); (0,34%) dan (0,17%).

Perkembangan inflasi dan andil inflasi berdasarkan kelompok komoditi untuk kota Batam pada bulan September 2005 dapat dilihat pada [tabel 2.2](#)

Tabel 2.2
Tingkat Inflasi dan Andil Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran

dalam persen (%)

Kelompok Pengeluaran	Inflasi	Andil Inflasi
UMUM	(0,75)	(0,75)
1. Bahan Makanan	(3,02)	(0,82)
2. Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau	0,41	0,07
3. Perumahan	0,03	0,01
4. Sandang	(0,34)	(0,01)
5. Kesehatan	0,20	0,00
6. Pendidikan, Rekreasi & Olah Raga	(0,17)	(0,01)
7. Transportasi dan Komunikasi	0,08	0,01

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Batam

2.2 INFLASI BERDASARKAN KELOMPOK KOMODITI

Pergerakan laju inflasi Kota Batam pada Triwulan I-2006 secara triwulanan (q-t-q) mengalami penurunan terhadap triwulan sebelumnya, yaitu dari 9,60% menjadi 0,66%. Pengaruh terbesar pembentuk laju IHK Kota Batam pada triwulan I-2006 terdapat pada bulan Maret 2006 (0,75%) dengan laju IHK terbesar terdapat pada kelompok bahan makanan (3,02%).

Tabel 2.3
Perkembangan Inflasi Kota Batam Menurut Kelompok Komoditi

dalam persen (%)

KELOMPOK KOMODITI	2004	2005				2006
	Tw.IV	Tw.I	Tw.II	Tw. III	Tw.IV	Tw.I
UMUM	1,89	2,65	0,39	1,52	9,60	0,66
1. Bahan Makanan	3,18	3,78	0,05	2,21	10,30	1,76
2. Makanan jadi, minuman, rokok & tembakau	4,99	1,52	1,12	0,69	5,98	0,93
3. Perumahan	0,32	0,70	0,24	1,46	4,38	0,14
4. Sandang	1,25	1,00	1,09	2,65	1,76	0,22
5. Kesehatan	0,07	0,67	1,17	1,30	1,46	0,56
6. Pendidikan, rekreasi & olahraga	0,34	0,07	0,14	6,98	0,63	(0,24)
7. Transportasi & Komunikasi	0,04	7,20	0,03	0,03	23,06	0,10

Sumber : Badan Pusat Statistik -Kota Batam

Bab 3

Perkembangan Moneter, Perbankan dan Sistem Pembayaran

3.1 KONDISI UMUM

Kinerja perekonomian Provinsi Kepulauan Riau pada triwulan I tahun 2006 menunjukkan peningkatan dibandingkan triwulan IV tahun 2005. Kondisi ini tercermin dari angka pertumbuhan PDRB dengan tahun dasar (base year) tahun 2000 atas dasar harga berlaku yang meningkat sebesar 2,71%. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan 2000 untuk triwulan I tahun 2006 diperkirakan sebesar 1,42% sedikit lebih rendah dibanding pertumbuhan pada triwulan IV tahun 2005 yang mencapai 1,71%. Untuk jumlah uang giral dan uang kuasi di wilayah kerja KBI Batam pada triwulan I-2006 mengalami penurunan dibandingkan triwulan sebelumnya, sementara total aset, DPK dan penyaluran kredit oleh bank umum juga mengalami penurunan.

Di bidang sistem pembayaran untuk transaksi tunai selama triwulan I-2006 mengalami *net outflow* sebesar Rp.129,71 miliar. Begitu pula kegiatan kliring di wilayah kerja KBI Batam dengan nilai transaksi non tunai melalui kliring mencapai Rp.2,17 triliun (146.241 lembar).

Berdasarkan indikator perekonomian dimaksud, diketahui bahwa kegiatan usaha sedang mengalami penurunan kinerja, terutama yang berada di luar sektor pertanian, pertambangan, bangunan, dan sektor perdagangan, hotel & restoran. Diperkirakan investasi di sektor ekonomi tersebut menggunakan sumber dana yang berada pada sektor keuangan.

3.2 MONETER

Dalam upaya mengendalikan tekanan inflasi dan sebagai upaya merespons potensi tekanan inflasi ke depan, kebijakan moneter cenderung ketat (*tight bias*) yang terus dilanjutkan pada triwulan I-2006. Berbeda dengan triwulan sebelumnya dengan kecenderungan meningkatnya BI-Rate, pada triwulan I-2006 BI-Rate mulai 9 Januari s/d 5 April 2006 tetap pada level 12,75%. Upaya ini dilakukan untuk mengendalikan tekanan inflasi yang berasal dari meningkatnya ekspektasi inflasi dan melemahnya nilai tukar. Kebijakan ini ditempuh dengan disertai penerapan beberapa langkah, yaitu: (1) Menaikkan BI-Rate, (2) Menaikkan GWM, (3) Meningkatkan suku bunga FASBI 7 hari dan maksimum suku bunga penjaminan. Upaya pengendalian inflasi ini diharapkan sejalan dengan kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk

PERKEMBANGAN MONETER, PERBANKAN DAN SISTEM PEMBAYARAN

memberi kompensasi berupa insentif guna menekan kembali biaya produksi sebagai dampak dari kenaikan harga BBM. Dengan kata lain koordinasi kebijakan sektor moneter dan fiskal, dengan mengedepankan kebijakan fiskal sesuai dengan keunggulannya akan lebih mampu mengatasi berbagai permasalahan yang ada terutama dalam perluasan lapangan kerja dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Perkembangan besaran moneter selama triwulan I-2006 menunjukkan bahwa tingkat suku bunga SBI tetap pada level 12,75%, suku bunga simpanan mengalami peningkatan, serta suku bunga kredit meningkat. Jumlah uang giral berupa simpanan masyarakat berbentuk giro, serta deposito terus mengalami peningkatan selama tahun 2005, namun pada triwulan I-2006 untuk giro dan tabungan mengalami penurunan, sedangkan deposito mengalami peningkatan dibanding triwulan sebelumnya.

Tabel 3.1
Perkembangan Uang Giral dan Kuasi di Wilker KBI Batam

(1=Rp 1 miliar)

Ket	2004	2005				2006
	Tw.IV	Tw. I	Tw. II	Tw. III	Tw. IV	Tw. I
Uang Giral	2.997,40	3.106,07	3.183,28	3.262,74	3.524,56	3.429,73
Giro	2.997,40	3.106,07	3.183,28	3.262,74	3.524,56	3.429,73
Uang Kuasi	4.723,65	4.700,43	4.937,68	5.111,04	5.182,59	5.122,77
Tabungan	3.144,82	3.084,28	3.132,15	3.040,04	3.013,30	2.819,91
Deposito	1.578,82	1.616,15	1.805,53	2.070,10	2.169,29	2.302,86
Total	7.721,05	7.806,50	8.120,96	8.373,78	8.707,15	8.552,49

Sumber : Bank Indonesia

Jumlah uang kuasi untuk wilayah kerja KBI Batam pada triwulan laporan, menunjukkan adanya penurunan yang diikuti dengan penurunan uang giral dimana sampai dengan triwulan I-2006 mengalami penurunan masing-masing sebesar Rp.94,83 miliar (2,69%) dan sebesar Rp.59,82 miliar (1,15%) dibandingkan dengan triwulan IV-2005. Sementara itu, pergerakan suku bunga simpanan cenderung meningkat. Untuk triwulan I-2006 rata-rata suku bunga simpanan berjangka 3 bulan mencapai 10.20%, tingkat suku bunga tabungan sebesar 10.69%, dan tingkat suku bunga kredit modal kerja serta kredit investasi masing-masing sebesar 21,00% dan 19,20%. Perkembangan suku bunga perbankan di wilker KBI Batam dapat dilihat pada tabel 3.2.

PERKEMBANGAN MONETER, PERBANKAN DAN SISTEM PEMBAYARAN

Tabel 3.2
Perkembangan Suku Bunga (%)

Keterangan	2004			2005				2006
	Tw.II	Tw.III	Tw.IV	Tw.I	Tw.II	Tw.III	Tw.IV	Tw.I
SBI 1 bulan	7.34	7.39	7.43	7.44	8.25	10	12.75	12.75
DPK *)								
Giro	10.75	9.25	14.6	14.72	6	6	6	6
Tabungan	9.88	10	9.6	8.88	14.71	9.33	10.63	10.69
Deposito 3 bulan	7.5	8.41	6.73	6.47	7.03	7.31	9.89	10.20
Kredit *)								
Modal Kerja	17.75	17.88	17.88	17.62	13.25	13.62	15.98	21.00
Investasi	17.75	18	18	17.53	13.71	14.76	16.64	19.20

Sumber : Bank Indonesia

*) Nilai rata-rata, yaitu: (nilai tertinggi+nilai terendah)/2

Jika dilihat tabel 3.2, atas dasar nilai rata-rata, terjadi peningkatan suku bunga simpanan dalam bentuk deposito dan tabungan, sedangkan suku bunga giro tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Sejalan dengan meningkatnya suku bunga simpanan dalam deposito, suku bunga kredit juga mengalami peningkatan.

3.3 PERBANKAN

Indikator-indikator perbankan di Provinsi Kepulauan Riau sampai dengan Triwulan I-2006 menunjukkan penurunan yang tercermin pada total asset, jumlah simpanan serta total kredit yang diberikan oleh perbankan.

Tabel 3.3
Perkembangan Indikator Perbankan di Wilker KBI Batam

Indikator	Periode					
	2004	2005				2006
		Tw. I	Tw.II	Tw. III	Tw. IV	Tw.I
1. Jaringan Kantor BU	32	34	33	33	33	36
a. Batam	21	23	23	23	23	24
b. Tanjung Pinang	7	7	7	7	7	9
c. Tj. Balai Karimun	3	3	2	2	2	2
d. Natuna	1	1	1	1	1	1
2. Jaringan Kantor BPR	4	5	8	9	10	10
a. Batam	3	4	6	6	7	7
b. Tanjung Pinang	-	-	1	2	2	2
c. Tj. Balai Karimun	1	1	1	1	1	1
d. Natuna	-	-	-	-	-	-
3. Total Asset	9.427.598	9.316.232	9.715.095	10.213.912	10.666.450	10.559.530
a. Batam	6.703.118	7.077.782	7.601.663	8.022.161	8.188.109	8.160.702
b. Tanjung Pinang	1.749.929	1.718.356	1.718.891	1.768.540	1.950.983	1.907.064
c. Tj. Balai Karimun	442.855	406.736	267.007	271.785	311.010	281.865
d. Natuna & Tj. Uban	104.600	113.358	127.534	151.426	216.348	209.899
4. Total DPK	7.721.045	7.806.495	8.120.960	8.373.778	8.707.149	8.552.495
a. Batam	5.458.347	5.599.666	6.049.847	6.224.301	6.269.948	6.178.643
b. Tanjung Pinang	1.724.321	1.692.427	1.678.209	1.728.343	1.916.705	1.884.600
c. Tj. Balai Karimun	437.779	400.665	263.969	268.182	306.791	279.067
d. Natuna	100.598	113.737	128.935	152.952	213.705	210.185
5. Total Kredit	4.397.899	4.761.130	5.104.373	5.685.474	5.877.399	5.771.562
a. Batam	3.763.287	4.121.633	4.465.106	4.988.122	5.138.278	5.029.911
b. Tanjung Pinang	498.143	501.424	521.712	571.737	607.850	604.457
c. Tj. Balai Karimun	120.798	120.940	97.217	102.511	108.393	111.945
d. Natuna	15.671	17.133	20.338	23.104	22.878	25.249
6. LDR	56,96%	60,99%	62,85%	63,68%	67,50%	67,48%

PERKEMBANGAN MONETER, PERBANKAN DAN SISTEM PEMBAYARAN

Indikator	Periode					
	2004	2005				2006
		Tw. I	Tw. II	Tw. III	Tw. IV	Tw. I
a. Batam	68,95%	73,60%	73,81%	74,90%	81,95%	81,41%
b. Tanjung Pinang	28,89%	29,63%	31,09%	30,63%	31,71%	32,07%
c. Tj. Balai Karimun	27,59%	30,18%	36,83%	38,25%	35,33%	40,11%
d. Natuna	15,58%	15,06%	15,77%	16,49%	10,71%	12,01%
7. NPL's	2,67%	2,72%	4,12%	4,56%	6,01%	4,27%
a. Batam	2,84%	2,85%	4,43%	3,80%	5,17%	3,14%
b. Tanjung Pinang	1,94%	2,13%	2,24%	12,09%	14,28%	14,65%
c. Tj. Balai Karimun	0,81%	0,86%	0,99%	1,21%	0,69%	0,19%
d. Natuna	0,15%	0,14%	0,03%	0,03%	0,00%	0,00%

3.3.1 Perkembangan Total Asset Bank Umum

Sampai dengan triwulan I-2006, total asset bank umum yang berada di wilayah kerja Kantor Bank Indonesia Batam mencapai Rp.10,56 triliun dan mengalami penurunan sebesar 1,00% dibanding triwulan IV-2005 yang tercatat sebesar Rp.10,67 triliun. Total asset terbesar dimiliki oleh Bank Swasta (Rp.5,36 triliun), Bank Pemerintah (Rp.4,45 triliun) dan BPD Riau (Rp.0,75 triliun). Perkembangan total asset per wilayah kerja KBI Batam ditunjukkan pada tabel 3.4

Tabel 3.4
Perkembangan Total Asset Perbankan di Wilker KBI Batam

(1= Rp 1 miliar)

Lokasi	2004			2005				2006	Pertumb (%)	
	Tw.2	Tw.3	Tw.4	Tw.1	Tw.2	Tw.3	Tw.4	Tw.1 Feb.	q-t-q	y-o-y
Kota Batam	5.574	6.142	6.703	7.078	7.602	8.022	8.188	8.161	-0,33	15,30
Wil.Tj.Pinang	1.672	1.624	1.750	1.718	1.719	1.769	1.951	1.907	-2,25	11,00
Kepln Riau*)	540	497	547	520	395	423	527	491	-6,83	-5,58
Total	7.787	8.263	9.000	9.316	9.716	10.214	10.666	10.559	-1,00	7,57
Nasional (triliun Rp)	1.152	1.171	1.215	1.224	1.279	1.357	1.470	1.465	3,97	19,77

*) wilayah Kepulauan Riau meliputi Tj.Uban, Kab. Tanjung Balai Karimun dan Kab. Natuna

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa penurunan total asset terbesar secara triwulanan (q-t-q) terdapat pada wilayah Kepulauan Riau, diikuti Tanjung Pinang dan Kota Batam. Namun demikian total aset secara tahunan (y-o-y) terdapat peningkatan di Kota Batam dan Tanjung Pinang, kecuali untuk Kepulauan Riau dimana secara tahunan mengalami penurunan sebesar -5,58%.

Secara nasional, jumlah asset bank umum posisi Januari 2006 (termasuk bank umum yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah) sebesar Rp.1.465 triliun sehingga total asset bank umum di wilker KBI Batam terhadap total asset bank umum nasional sebesar 0,72%.

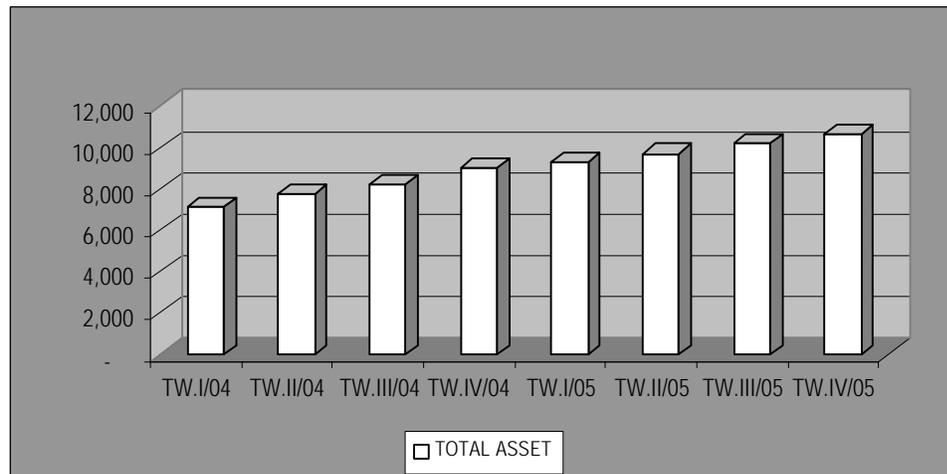
PERKEMBANGAN MONETER, PERBANKAN DAN SISTEM PEMBAYARAN

Jika dilihat dari kelompok bank, penurunan total asset terbesar berasal dari kelompok Bank Pembangunan Daerah Riau sebesar 0,12%, diikuti oleh kelompok bank swasta yang mencapai 0,03%, dan kelompok bank pemerintah 0,04%.

Selama triwulan laporan terdapat peningkatan jumlah kantor bank umum yang beroperasi di wilayah kerja Bank Indonesia Batam yaitu menjadi sebanyak 24 bank terdiri dari : 4 Bank Umum Pemerintah, 1 Bank Pembangunan Daerah Riau, 1 Bank Swasta Asing, 1 Bank Swasta Campuran, dan 17 Bank Swasta Nasional. Sedangkan dari sisi jumlah kantor selama triwulan I-2006 terdapat 137 kantor bank umum termasuk 17 kantor BRI Unit, 5 kantor BPD. Untuk jumlah Anjungan Tunai Mandiri (ATM) pada triwulan I-2006 sebanyak 303 ATM.

Grafik 3.1

Grafik Perkembangan Total Asset Bank Umum di Wilker KBI Batam



Sumber : Bank Indonesia

3.3.2 Perkembangan Penghimpunan Dana Bank Umum

Penghimpunan dana masyarakat di bank umum selama triwulan laporan mencapai Rp.8,55 triliun atau menurun sebesar Rp.154,65 miliar (1,78%) dibandingkan triwulan IV-2005. Sementara terhadap posisi Desember 2004 (y-o-y) terdapat peningkatan sebesar Rp.831,45 miliar (10,77%).

Simpanan berbentuk giro memiliki jumlah terbesar sampai dengan triwulan I-2006 yang mencapai Rp.3,43 triliun, diikuti oleh tabungan sebesar Rp.2,82 triliun dan deposito sebesar Rp.2,30 triliun. Data ini menunjukkan bahwa masyarakat penyimpan di wilker KBI Batam lebih cenderung memilih simpanan berbentuk giro dan tabungan yang bersifat likuid dibandingkan simpanan berjangka. Hal ini antara lain dipengaruhi oleh sektor ekonomi

PERKEMBANGAN MONETER, PERBANKAN DAN SISTEM PEMBAYARAN

industri dan perdagangan yang merupakan sektor andalan di Provinsi Kepulauan Riau sehingga masyarakat membutuhkan dana yang mudah dicairkan untuk kebutuhan transaksi dan kegiatan perekonomiannya. Berdasarkan data pada tabel 3.4, simpanan dalam bentuk giro dan tabungan menunjukkan penurunan dibandingkan triwulan IV 2005 masing-masing sebesar -2,69% dan -6,40%, sedangkan deposito menunjukkan peningkatan sebesar 6,13%. Peningkatan jumlah dana deposito antara lain akibat adanya *redemption* (penarikan dalam jumlah besar) reksa dana oleh para nasabah yang selanjutnya dana tersebut dialihkan ke deposito. Selain itu, faktor suku bunga deposito yang cukup tinggi juga menjadi salah satu daya tarik nasabah untuk mengalihkan dananya di deposito. Untuk perkembangan dana yang dapat dihimpun oleh bank umum yang berada di wilayah kerja KBI Batam sampai dengan triwulan I tahun 2006 dapat dilihat tabel 3.5.

Tabel 3.5
Penghimpunan Dana Bank Umum di Wilker KBI Batam

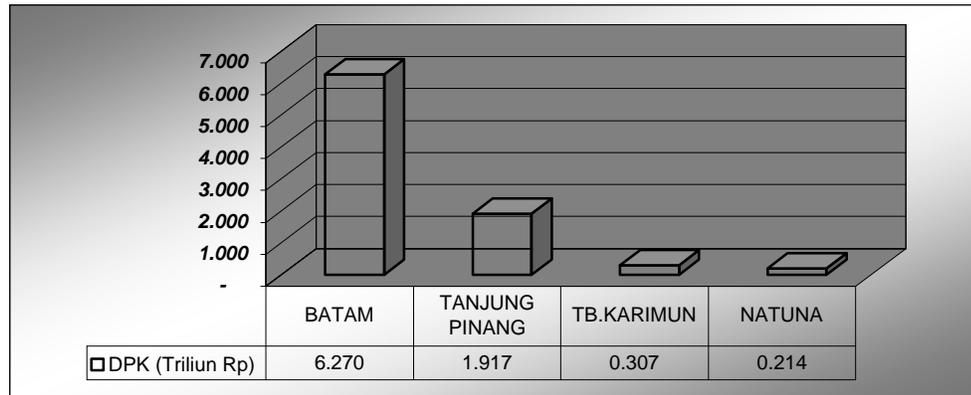
Keterangan	2004			2005				2006	Pert.TW.1 /06(%) q-t-q
	Tw.2	Tw.3	Tw.4	Tw.1	Tw.2	Tw.3	Tw.4	Tw.1	
Bank Umum	6.758	7.171	7.721	7.806	8.121	8.374	8.707	8.552	-1,78
Giro	2.746	2.861	2.997	3.106	3.183	3.263	3.525	3.430	-2,69
Deposito	1.270	1.409	1.579	1.616	1.806	2.071	2.169	2.302	6,13
Tabungan	2.742	2.901	3.145	3.084	3.132	3.040	3.013	2.820	-6,40
Bank Pem*)	2.975	3.175	3.395	3.413	3.614	3.702	4.072	4.001	-1,74
Giro	917	1.049	1.103	1.207	1.284	1.363	1.639	1.569	-4,27
Deposito	571	569	584	601	667	727	749	881	17,62
Tabungan	1.487	1.558	1.707	1.605	1.993	1.612	1.684	1.551	-7,90
Bank Swasta	3.783	3.995	4.326	4.393	4.507	4.672	4.635	4.551	-1,81
Giro	1.829	1.812	1.894	1.899	1.899	1.899	1.886	1.860	-1,39
Deposito	699	840	994	1.015	1.469	1.344	1.420	1.422	0,14
Tabungan	1.255	1.343	1.437	1.479	1.139	1.428	1.329	1.269	-4,51

Sumber : Bank Indonesia Batam

*)Termasuk BPD Riau

Kelompok Bank Swasta selama triwulan laporan masih mendominasi tingkat perpercaran DPK yang mencapai 53,22% dengan komposisi giro sebesar 54,23%, tabungan sebesar 45,00% dan deposito berjangka sebesar 61,77% terhadap total DPK Bank Umum. Sedangkan komposisi DPK berdasarkan wilayah menunjukkan bahwa Kota Batam masih memberikan kontribusi terbesar, yaitu Rp.6,18 triliun (72,24%), diikuti oleh Tanjung Pinang sebesar Rp.1,88 triliun (22,03%), sedangkan untuk Tanjung Balai Karimun sebesar Rp.0,28 triliun (3,26%) dan wilayah Natuna sebesar Rp.0,21 triliun (2,45%). Data tersebut dapat dilihat pada grafik 3.2

Grafik 3.2.
Perkembangan Total DPK Bank Umum di Wilker KBI Batam Triwulan I-2006



Sumber : Bank Indonesia

3.3.3 Perkembangan Penyaluran Kredit Bank Umum

Jumlah kredit yang disalurkan oleh bank umum di wilayah kerja Bank Indonesia Batam sampai dengan triwulan I-2006 mencapai Rp.5,77 triliun menurun dibandingkan triwulan IV 2005 sebesar Rp.105,84 miliar (1,80%). Penyaluran kredit terbesar terdapat pada kelompok Bank Pemerintah (termasuk BPD) sebesar Rp.3,14 triliun, sedangkan Bank Swasta sebesar Rp.2,63 triliun. Sementara itu, untuk data nasional jumlah penyaluran kredit dalam rupiah oleh Bank Umum posisi Maret 2006 mencapai Rp.687 triliun, sehingga nilai kredit bank umum di wilker KBI Batam dibandingkan nilai kredit bank umum nasional mencapai 0,84%.

Untuk mendorong fungsi intermediasi dan percepatan konsolidasi perbankan, peningkatan kemampuan perbankan dalam pengelolaan risiko kredit, penerapan prinsip kehati-hatian dan praktik perbankan yang sehat, serta meningkatkan perlindungan nasabah melalui kepastian penerapan standar pelayanan perbankan yang baku, aman dan terpercaya, maka dikeluarkan kebijakan Bank Indonesia pada bulan Januari 2005 yaitu Peraturan Bank Indonesia (PBI) tentang : Pelonggaran BMPK, Sistem Informasi Debitur, Sekuritisasi Aset Kualitas Aktiva Produktif, BMPK Pembelian Saham Bank, Pinjaman Luar Negeri, Perlindungan Nasabah dan Transparansi Produk Perbankan yang akan mulai diberlakukan pada bulan Juli 2005. Mulai Juli 2005, Bank Indonesia telah mengimplementasikan penguatan kerangka kerja kebijakan moneter yang konsisten dengan *Inflation Targeting Framework (ITF)* yang mencakup 4 (empat) elemen dasar, yaitu (1) penggunaan suku bunga BI Rate sebagai *policy reference rate*, (2) proses perumusan kebijakan moneter yang antisipatif, (3) strategi komunikasi yang lebih transparan, dan (4) penguatan koordinasi kebijakan dengan Pemerintah. Langkah-langkah dimaksud ditujukan untuk meningkatkan efektivitas dan tata kelola (*governance*) kebijakan

PERKEMBANGAN MONETER, PERBANKAN DAN SISTEM PEMBAYARAN

moneter dalam mencapai sasaran akhir kestabilan harga untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, Bank Indonesia sesuai dengan Arsitektur Perbankan Indonesia (API) mulai membangun skema asuransi kredit dengan bekerja sama dengan pihak lain. Perkembangan outstanding kredit bank umum di wilayah kerja Bank Indonesia Batam dapat dilihat pada [tabel 3.6](#)

Tabel 3.6
Perkembangan Outstanding Kredit Bank Umum di Wilayah Kerja Bank Indonesia Batam

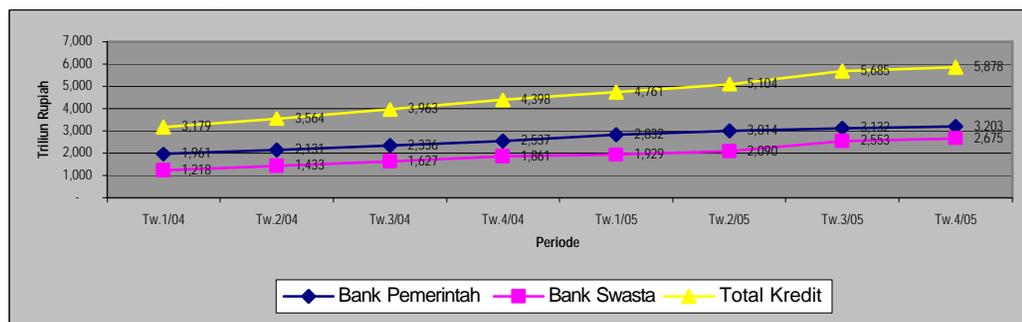
(1=Rp miliar)

URAIAN	2004	2005				2006	Pertumbuhan	
	Tw.4	Tw.1	Tw.2	Tw.3	Tw.4	Tw.1	q-t-q	y-o-y
Total Kredit	4.397,9	4.761,1	5.104,4	5.685,5	5.877,4	5.771,6	-1,80	21,22
Bank Pem *)	2.537,4	2.832,2	3.014,3	3.132,4	3.202,9	3.139,8	-1,97	10,86
Bank Swasta	1.860,5	1.928,9	2.090,1	2.553,1	2.674,5	2.631,8	-1,60	36,44

Sumber : Bank Indonesia
*) termasuk BPD Riau

Berdasarkan data pada [tabel 3.6](#) diatas, terlihat bahwa perkembangan *outstanding* kredit bank umum selama 2 tahun terakhir (y-o-y) menunjukkan peningkatan. Untuk pergerakan outstanding kredit bank umum dapat dilihat pada [grafik 3.3](#)

Grafik 3.3
Perkembangan Outstanding Kredit Bank Umum di Wilker KBI Batam



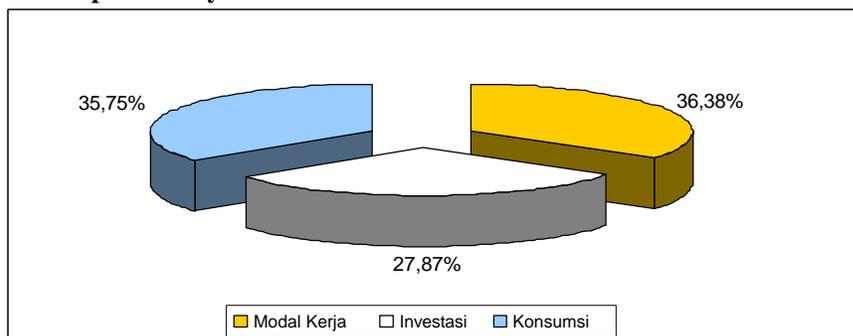
Sumber : Bank Indonesia

Jika dilihat dari jenis penggunaannya, dibandingkan pada triwulan sebelumnya terdapat pada triwulan I-2006 untuk kredit modal kerja mengalami penurunan terbesar (q-t-q) sebesar -2,64% dari Rp.2,14 triliun pada Triwulan IV-2005 menjadi Rp.2,08 triliun pada triwulan laporan, kemudian kredit investasi menurun sebesar -5,30% dari Rp.1,64 triliun menjadi

PERKEMBANGAN MONETER, PERBANKAN DAN SISTEM PEMBAYARAN

sebesar Rp.1,51 triliun, sedangkan Kredit Konsumsi mengalami peningkatan 3,68% yaitu dari Rp.2,10 triliun pada triwulan IV-2005 menjadi Rp.2,12 triliun pada triwulan laporan. Untuk komposisi penyaluran kredit berdasarkan jenis penggunaan, dapat dilihat pada grafik 3.4

Grafik 3.4
Komposisi Penyaluran Kredit di Wilker KBI Batam Triwulan I-2006



Sumber: Bank Indonesia

Memperhatikan perkembangan penggunaan kredit posisi Maret 2006, penyaluran kredit perbankan lebih dominan kepada sektor konsumtif yaitu sebesar 37,75%, diikuti oleh kredit modal kerja 36,07% dan kredit investasi 26,18%.

Tabel 3.7
Perkembangan Penyaluran Kredit Bank Umum

(1= Rp 1 miliar)

Keterangan	Tw.2 2004	Tw.3 2004	Tw.4 2004	Tw.1 2005	Tw.2 2005	Tw.3 2005	Tw.4 2005	Tw.1 2006	Pert % qtq	Pert % yoy
Sektor Ekonomi	3.564	3.963	4.398	4.761	5.104	5.685	5.877	5.771	-1,80	21,21
Pertanian	81	86	118	120	129	130	148	150	1,35	25,00
Pertambangan	18	69	49	43	42	51	59	47	-20,33	9,30
Industri	736	769	685	847	811	1.059	1.025	909	-11,32	7,32
Listrik, Gas, Air	0,152	0,107	0,206	0,131	0,322	2	2	4	100	2,953
Konstruksi	219	244	478	544	573	631	579	548	-5,35	0,74
Perdag, Htl & Res	904	1.015	1.136	1.133	1.223	1.279	1.332	1.304	-2,10	15,09
Angkutan	57	64	57	61	61	78	99	94	-5,05	54,09
Jasa-jasa	298	330	372	408	434	439	451	531	17,74	30,15
Lainnya	1.251	1.386	1.502	1.604	1.831	2.017	2.106	2.183	3,66	36,09
Jenis Penggunaan	3.564	3.963	4.398	4.761	5.104	5.685	5.877	5.771	-1,80	21,21
Modal Kerja	1.276	1.443	1.654	1.804	1.849	1.962	2.138	2.081	-2,67	15,35
Investasi	1.040	1.137	1.247	1.359	1.433	1.713	1.638	1.511	-7,75	11,18
Konsumsi	1.248	1.382	1.497	1.598	1.822	2.011	2.102	2.179	3,66	36,36

PERKEMBANGAN MONETER, PERBANKAN DAN SISTEM PEMBAYARAN

Keterangan	Tw.2 2004	Tw.3 2004	Tw.4 2004	Tw.1 2005	Tw.2 2005	Tw.3 2005	Tw.4 2005	Tw.1 2006	Pert % qtq	Pert % yoy
Kelompok Bank	3.564	3.963	4.398	4.761	5.104	5.685	5.877	5.771	-1,80	21,21
Bank Pemerinth	2.131	2.336	2.537	2.832	3.014	3.132	3.202	3.139	-1,97	10,84
Bank Swasta	1.433	1.627	1.861	1.929	2.090	2.553	2.675	2.632	-1,61	36,44

Sumber : *Bank Indonesia*

Dari sisi sektor ekonomi, selama triwulan I-2006, pertumbuhan kredit terbesar secara triwulanan (q-t-q) terdapat pada sektor listrik, gas, air (100%). Sedangkan sektor perdagangan, hotel & restoran memiliki penyaluran kredit terbesar dengan nilai nominal terbesar yang mencapai Rp.1.30 triliun.

Bab 4

Keuangan Pemerintah Daerah Periode Tahun 2006

4.1 APBD Provinsi Kepulauan Riau

Jumlah anggaran yang ditetapkan oleh suatu Pemerintah Daerah menjadi salah satu faktor pendukung utama terhadap kemajuan dan perkembangan suatu daerah, demikian pula dengan Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri dari 6 Kota/Kabupaten yaitu: Kota Batam, Kota Tanjung Pinang, Kabupaten Kepulauan Riau, Kabupaten Tanjung Balai Karimun, Kabupaten Natuna dan Kabupaten Lingga.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah, jumlah pendapatan Provinsi Kepulauan Riau sampai dengan caturwulan I-2006 sebesar Rp.130,92 miliar atau sebesar 20,59% dari jumlah yang ditargetkan.

Tabel 4.1
Rekapitulasi Realisasi Penerimaan Provinsi Kepulauan Riau

(1=Rp 1 miliar)

No	Jenis Penerimaan	Target Penerimaan Th. 2006	Realisasi Penerimaan s/d caturwulan I-2006	% Pencapaian Target
	PENDAPATAN	635,61	130,92	20,59
A	PENDAPATAN ASLI DAERAH	235,54	83,20	35,32
1	Pajak Daerah	229,12	78,40	34,21
2	Retribusi Daerah	0,42	0,13	32,11
3	Lain-Lain PAD yang Sah	6,00	4,67	77,89
B	DANA PERIMBANGAN	400,07	47,72	11,93
1	Bagi Hasil Pajak	100,55	2,43	2,41
2	Bagi Hasil Bukan Pajak	121,52	0,71	0,59
3	Dana Alokasi Umum (DAU)	178,00	44,58	25,05
4	Dana Alokasi Khusus (DAK)	0,00	0,00	0,00
C	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	0,00	0,00	0,00

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah – Provinsi Kepulauan Riau

Berdasarkan realisasi pendapatan Provinsi Kepulauan Riau sampai dengan caturwulan I-2006 sebagian besar disumbangkan oleh Pendapatan Asli Daerah sebesar 63,55% dan dana perimbangan sebesar 36,45%. Pendapatan Asli Daerah terbesar diperoleh dari Pajak Daerah sebesar Rp.78,40 miliar yang sebagian besar disumbangkan oleh Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), sementara jumlah lain-lain PAD yang sah sebagian besar disumbangkan oleh Jasa Giro Bank Riau dan Bank Mandiri sebesar Rp.4,67 miliar.

4.2 APBD Kota Batam

Target APBD Kota Batam 2006 terdiri dari pos pendapatan sebesar Rp.410,75 miliar dan pos pembiayaan sebesar Rp.63,74 miliar. Target APBD Kota Batam tahun 2006 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2005, dimana pada tahun 2005 total pembiayaan sebesar Rp 60,05 miliar sementara total pendapatan sebesar Rp.356,10 miliar.

Realisasi penerimaan pendapatan Kota Batam sampai dengan triwulan I-2006 mencapai Rp.156,30 miliar dan telah terealisasi sebesar 32,94% dari target pendapatan Kota Batam 2006 yang telah ditetapkan. Penerimaan tersebut berasal dari pembiayaan sebesar Rp.91,77 miliar (143,97% dari target 2006), Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp.18,81 miliar (26,85% dari target 2006) dan Dana Perimbangan sebesar Rp.45,72 miliar (13,42% dari target 2006). Besarnya jumlah penerimaan yang berasal dari pos pembiayaan berasal dari sisa anggaran tahun lalu yang mencapai Rp.91,64 miliar (148,43% dari target 2006), sedangkan pengembalian pokok pinjaman dana bergulir mencapai Rp.0,13 miliar (6,41% dari target 2006).

Sementara itu, realisasi penerimaan daerah yang disumbangkan dari pos Pajak Daerah terbesar diperoleh dari sub pos pajak penerangan jalan yang berjumlah Rp.4,99 miliar (38,38% dari target APBD 2006), diikuti oleh penerimaan dari pajak hotel sebesar Rp.3,62 miliar (28,95% dari target 2006).

Tabel 4.2
Realisasi Penerimaan Pendapatan Kota Batam Periode 2006

(1=Rp 1)

JENIS PUNGUTAN	REALISASI Penerimaan 2006		
	TARGET APBD (APBD Murni)	REALISASI s.d Maret	%
A. Pembiayaan			
1. Sisa Anggaran Tahun Lalu	61.742.413.864	91.642.008.192	148,43
2. Pengembalian Pokok Pinjaman Dana Bergulir	2.000.000.000	128.229.131	6,41
Jumlah - A - Pembiayaan	63.742.413.864	91.770.237.323	143,97
B. Pendapatan Asli Daerah (PAD)			
I. Pajak Daerah			
1. Pajak Hotel	12.500.000.000	3.618.375.327	28,95
2. Pajak Restoran	8.000.000.000	2.217.274.695	27,72
3. Pajak Hiburan	3.700.000.000	883.651.390	23,88
4. Pajak Reklame	2.500.000.000	662.514.880	26,50
5. Pajak Penerangan Jalan	13.000.000.000	4.989.918.196	38,38
6. Pajak Bahan Galian Gol. C	2.000.000.000	352.812.730	17,64
7. Pajak Parkir	300.000.000	103.392.140	34,46
Jumlah Pajak (I)	42.000.000.000	12.827.939.358	30,54
II. Retribusi Daerah			
1. Retribusi Pelayanan Kesehatan	1.210.000.000	380.127.400	31,42
2. Retribusi Persampahan/Kebersihan	6.500.000.000	1.676.455.000	25,79
3. Retribusi Biaya Cetak KTP	2.800.000.000	323.995.000	11,57

KEUANGAN DAERAH

JENIS PUNGUTAN	REALISASI Penerimaan 2006		
	TARGET APBD (APBD Murni)	REALISASI s.d Maret	%
4. Ganti Biaya Cetak Akta Catatan Sipil	275.000.000	105.275.000	38,28
5. Retribusi Parkir di tepi jalan umum	660.000.000	169.560.000	25,69
6. Pelayanan pasar	350.000.000	72.510.000	20,72
7. Pengujian Kendaraan Bermotor	1.116.750.000	298.401.250	26,72
8. IMB	5.000.000.000	997.745.600	19,95
9. Izin Trayek	275.550.000	85.750.000	31,12
10. Penetapan jenis dan sifat kendaraan	15.000.000	2.575.000	17,17
11. Izin Penyelenggaraan Reklame	550.000.000	134.685.280	24,49
12. Siup	1.000.000.000	271.337.750	27,13
13. Izin Parawisata	441.920.000	120.984.000	27,38
Jumlah Retribusi (II)	20.194.220.000	4.639.401.280	22,97
1. Deviden bagian laba BPD Riau	500.000.000	0,00	0,00
Jumlah laba perusahaan milik daerah	500.000.000	0,00	0,00
1. Jasa Giro	1.000.000.000	536.651.481	53,67
2. Sumbangan Pihak Ketiga	4.600.000.000	22.681.280	0,49
3. Penerimaan Hasil Penjualan Tiket	786.966.500	210.921.500	26,80
4. PAD Lain-lain Yang Sah	967.000.000	570.554.412	59,00
Jmlh Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yg sah	7.353.966.500	1.340.808.673	18,23
JUMLAH - B - PAD	70.048.186.500	18.808.149.311	26,85
C. Dana Perimbangan			
I. Bagi Hasil Pajak	109.165.000.000	6.100.060.896	5,59
II. Bagi Hasil Bukan Pajak	42.100.000.000	2.028.549.502	4,82
III. Dana Alokasi Umum	149.000.000.000	37.300.749.999	25,03
IV. Dana Alokasi Khusus	9.610.000.000	0,00	0,00
V. Bagi Hasil Pajak Propinsi	30.827.000.000	289.870.852	0,94
D. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	0,00	0,00	0,00
JML PENDAPATAN KOTA BATAM	474.492.600.364	156.297.617.883	32,94

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Batam

Bab 5

Prospek Perekonomian Daerah

Selama triwulan I – 2006, perkembangan indikator perekonomian Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan perbaikan yang cukup menggembirakan yang ditunjukkan antara lain pada variabel tingkat PDRB, laju inflasi, serta variabel perbankan seperti jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK), jumlah penyaluran kredit, tingkat NPLs, serta tingkat LDR.

Disamping itu sektor industri dan perdagangan yang semula sempat mengalami penurunan pada tahun 2005 menunjukkan perbaikan di awal tahun 2006. Hal ini ditunjukkan pada kontribusi sektor industri dan perdagangan pada pembentukan PDRB Provinsi Kepulauan Riau.

Perkembangan indikator-indikator tersebut memberikan harapan bagi kemajuan nasional maupun regional serta menumbuhkan tingkat optimisme masyarakat.

5.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pada awal tahun 2006, PDRB Provinsi Kepulauan Riau pada triwulan I-2006 diperkirakan sebesar Rp.10,88 triliun dan mengalami pertumbuhan positif sebesar 2,71% dengan faktor pendorong utama adalah sektor industri dan perdagangan. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Batam sebagai daerah industri dan perdagangan masih memiliki potensi yang cukup tinggi yang juga tercermin pada jumlah Penanaman Modal Asing (PMA) di Kota Batam yang meningkat cukup tinggi pada periode Januari – Februari 2005 yaitu sebesar 90%.

Salah satu hal yang diperkirakan mempengaruhi jumlah PMA tersebut adalah kebijakan Pemerintah yang memberikan kemudahan dan fasilitas khusus di bidang kepabeanan, fiskal, dan perdagangan untuk pelaku usaha dan investor di Pulau Batam, Bintan dan Karimun.

Melihat pergerakan tingkat PDRB Provinsi Kepulauan Riau selama beberapa tahun terakhir serta dengan mempertimbangkan kestabilan kondisi perekonomian kedepannya, maka diproyeksikan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau pada triwulan II – 2006 akan mengalami pertumbuhan positif dimana sektor industri masih menjadi penyumbang terbesar.

5.2. Prospek Inflasi

Laju inflasi Kota Batam yang tercermin pada pergerakan nilai Indeks Harga Konsumen (IHK). Pada triwulan I – 2006 laju inflasi Kota Batam sebesar 0,66% (q-t-q) lebih rendah dibandingkan triwulan I – 2005 sebesar 2,65%. Hal ini menunjukkan pergerakan harga komoditi di Kota Batam secara triwulanan cukup stabil.

Dengan melihat kondisi perekonomian baik ekonomi makro maupun moneter saat ini, dimana tingkat suku bunga serta nilai tukar rupiah terhadap valuta asing terutama USD dan SGD yang cukup stabil, maka diperkirakan laju pergerakan harga komoditi-komoditi di Kota Batam pada triwulan II – 2006 tidak akan mengalami fluktuasi yang terlalu besar. Hal ini juga dipengaruhi oleh upaya Bank Indonesia untuk mengontrol kondisi moneter antara lain dari sisi jumlah uang beredar maupun tingkat suku bunga.

Disamping itu, sektor industri yang mendominasi perekonomian Kota Batam juga akan mempengaruhi daya beli masyarakat. Meningkatnya jumlah Penanaman Modal Asing (PMA) di Kota Batam pada triwulan I – 2006 diperkirakan akan menambah lapangan kerja sehingga jumlah pengangguran di Kota Batam akan berkurang yang juga akan berpengaruh pada pendapatan masyarakat.

5.3. Prospek Perbankan

Pada awal tahun 2006, kinerja sektor perbankan di wilayah Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan sedikit penurunan. Hal ini tercermin pada indikator-indikator perbankan yang bergerak menurun dibandingkan akhir tahun 2005, antara lain: total asset, total Dana Pihak Ketiga (DPK), total penyaluran kredit, serta tingkat LDR.

Dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada tanggal 7 Maret 2006, BI memutuskan untuk tetap mempertahankan arah kebijakan moneter ketat (*tight biased*) yang merupakan cerminan komitmen BI dalam mengendalikan tekanan inflasi ke depan yang diperkirakan masih relatif tinggi. Terkait dengan itu, BI memutuskan tidak mengubah BI Rate yang berlaku saat ini yaitu sebesar 12,75%. Penetapan BI Rate di level 12,75% tersebut diikuti pula dengan relatif stabilnya suku bunga deposito dimana masyarakat menganggap suku bunga tersebut masih cukup menarik dan tercermin dari tetap positifnya pertumbuhan deposito pada triwulan I-2006, meskipun secara keseluruhan total DPK mengalami penurunan (q-t-q).

PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH

Berdasarkan kondisi perkembangan indikator perbankan selama triwulan I-2006, maka diperkirakan pada triwulan II-2006 perkembangan indikator perbankan cenderung stabil dimana kebijakan BI untuk menetapkan kebijakan moneter ketat (*tight biased*) masih akan tetap dipertahankan. Ekspektasi inflasi yang masih cukup tinggi di masyarakat akan turut mempengaruhi tingkat suku bunga yang berlaku sehingga mempengaruhi tingkat permintaan kredit oleh masyarakat. Disamping itu, perbankan cenderung masih akan menanamkan dana yang dimilikinya pada instrumen moneter yang dimiliki BI antara lain melalui Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

BATAM DARI FTZ KE SEZ**✎ Landasan Hukum:**

Batam adalah sebuah pulau dengan luas 415 km² atau sebesar 41.500 Ha atau 64% dari luas Singapura. Awal pengembangan Pulau Batam berdasarkan Keputusan Presiden (KEPPRES) No.74 tahun 1971 tentang Pengembangan Pulau Batam atau yang kita kenal saat ini dengan debutan **Badan Otorita Batam (BOB)** atau biasa juga disebut sebagai **BIDA (The Batam Industrial Development Authority)**.

Seiring dengan perkembangan industri di Batam, berdasarkan KEPPRES No.41 tahun 1973 Batam ditetapkan sebagai Daerah Industri Pulau Batam dan diikuti dengan KEPPRES No.33 tahun 1974 tentang Penunjukan dan Penetapan Beberapa Wilayah Usaha *Bonded Warehouse*. Sebagai daerah industri, Pulau Batam pada awalnya akan dijadikan sebagai alternatif bagi penampungan kegiatan yang tidak dapat dilakukan oleh Singapura, ide dan konsepnya adalah sebagai daerah industri dengan sarana dan prasarana setingkat dengan Singapura.

✎ Free Trade Zone:

Berangkat dari keputusan-keputusan tersebut terdapat wacana untuk membentuk Batam menjadi *Free Trade Zone (FTZ)* atau Zona Perdagangan Bebas. Ide pembentukan FTZ tersebut karena pada dasarnya secara *de facto* di Batam telah melakukan FTZ namun secara *de jure* belum disahkan oleh pemerintah. Tujuan dari pembentukan FTZ adalah untuk meningkatkan investasi pada suatu daerah dimana bea dan kuota dihapuskan dan kebutuhan akan birokrasi direndahkan dalam rangka menarik perusahaan-perusahaan dengan menambahkan insentif untuk melakukan usaha. Sebagian besar FTZ berada di negara berkembang, biasanya zona-zona ini ditetapkan di bagian yang kurang berkembang di negara tersebut karena diharapkan zona tersebut akan menarik para pengusaha dan mengurangi kemiskinan dan pengangguran dan stimulasi ekonomi di wilayah tersebut.

✎ Special Economic Zone (SEZ):

SEZ hampir sama dengan FTZ, namun mempunyai skala yang lebih kecil, tujuannya adalah sama untuk meningkatkan investasi pada suatu daerah dalam suatu negara. Beberapa negara telah menerapkan SEZ diantaranya adalah RRC, India, Jordania, Rolandia, Kazakhstan, Filipina dan Rusia. Tiga puluh tahun yang lalu 80 *Special Economis Zone (SEZ)* di 30 negara menghasilkan USD 6 milyar dari ekspor serta dapat mempekerjakan 1 juta tenaga kerja. Saat ini 3.000 SEZ telah berjalan di 120 negara dan membukukan transaksi lebih dari USD 600 milyar dalam ekspor dan menyerap 50 juta tenaga kerja langsung. Dengan menawarkan kemudahan dalam perdagangan dan produksi untuk ekspor, SEZ dapat menarik investasi, perdagangan valuta asing, tenaga kerja dan meningkatkan teknologi dan

infrastruktur. SEZ tidak termasuk dalam perencanaan secara nasional sehingga harus dibedakan termasuk perencanaan keuangannya. Pejabat yang membawahi SEZ adalah setingkat dengan kepala Provinsi dalam hal ini adalah Gubernur.

Dari beberapa keuntungan pemberlakuan SEZ pada suatu daerah, beberapa *issue* maupun kritik juga disampaikan antara lain adalah SEZ hanya menarik investasi dan menimbulkan distorsi dibidang insentif dibandingkan dengan membentuk kondisi yang saling menguntungkan, insentif yang diberikan menciptakan beban bagi pembayar pajak dan merusak lingkungan serta merusak standar buruh. Selain itu dipercayai juga bahwa biaya-biaya untuk memelihara zona khusus tersebut tidak menguntungkan perekonomian dan kesejahteraan.

✍ Kondisi Batam:

Demikian pula halnya Batam, ide pembentukan FTZ telah didengungkan oleh pemerintah daerah maupun para pengusaha Batam dengan mengajukannya kepada Pemerintah Pusat, namun demikian ide tersebut belum dapat terlaksana. Kendala yang dihadapi oleh para pelaku ekonomi maupun pemerintah daerah seperti yang sering dikemukakan adalah landasan payung hukum pembentukan FTZ, mengacu kepada banyak negara yang memberlakukan FTZ pada daerahnya, diketahui bahwa pembentukan FTZ ditetapkan dengan Undang-Undang, hal mana secara hukum kekuatannya dapat dipertanggungjawabkan.

Pengembangan Pulau Batam saat ini masih mendasarkan kepada KEPPRES maupun Peraturan Pemerintah (PP) ataupun Keputusan Menteri (KEPMEN) sehingga kemungkinan berubahnya ketentuan seiring dengan berubahnya pemerintahan dapat dimungkinkan terjadi, disatu sisi dalam investasi diperlukan konsistensi di segala bidang terutama di bidang regulasi maupun birokrasi, hal tersebut diinginkan oleh para pengusaha dengan pertimbangan bahwa investasi tersebut akan berjangka waktu panjang sehingga perlu ada kepastian di bidang perundang-undangan untuk dapat melindungi investasinya. Tertundanya pelaksanaan FTZ di Batam tentunya mempunyai konsekuensi yang cukup besar seperti misalnya tertundanya rencana investasi serta hengkangnya beberapa perusahaan yang memindahkan lokasi usahanya di tempat lain (luar negeri seperti misalnya Malaysia – Tanjung Pelepas, Vietnam maupun China) yang menawarkan insentif di bidang birokrasi maupun perpajakan. Permasalahan pembentukan FTZ di Batam adalah belum terintegrasinya pemerintah dan DPR untuk menetapkan dalam bentuk Undang-Undang seperti yang diharapkan oleh semua kalangan.

Setelah era FTZ muncullah ide untuk membentuk suatu kawasan yang dinamakan *Special Economic Zone* (SEZ) yang juga merupakan suatu zona khusus untuk peningkatan investasi, ide pembentukan SEZ ini pada dasarnya adalah karena tertundanya pemberlakuan FTZ bagi Batam, di satu sisi, daerah lain baik di Indonesia maupun mancanegara telah banyak yang memberlakukan suatu kawasan khusus

baik berupa FTZ, SEZ maupun FTZ (*Free Trade Area*). Letal geografis yang sangat menunjang diikuti dengan adanya sarana dan prasarana bagi Pulau Batam, penetapan sebagai FTZ maupun SEZ sebenarnya sudah sangat mendesak untuk diberikan walaupun di sisi lain banyak pula yang meragukan kesuksesannya, hanya bagaimana pemerintah menetapkan bentuk dan landasan hukumnya agar terdapat kejelasan, sehingga *opportunity* yang ada dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kesejahteraan masyarakat.

✍ Perkembangan SEZ di Batam:

Rencana pengembangan SEZ adalah kebijakan pemerintah pada tahun 2006 dalam upaya untuk menggairahkan kembali iklim investasi di Indonesia. Salah satu daerah yang akan dijadikan sebagai kawasan SEZ adalah Batam, jauh sebelum adanya kebijakan SEZ saat ini Batam yang merupakan daerah *Bonded Zone Area* sesuai dengan keputusan pemerintah pada waktu itu, pada dasarnya sudah lebih mengenal pemberlakuan kawasan berikat, selain itu sesuai dengan rencana pemerintah pada waktu itu, Batam sudah diproyeksikan sebagai kawasan yang dapat menunjang keberadaan Singapura dengan kekhususan yang diberikan dan dikelola oleh Badan Otorita Batam (BOB).

Seiring dengan makin berkembangnya Batam sebagai kawasan industri dengan sarana dan prasarana yang ada, dirasakan bahwa untuk lebih menarik investor dalam menanamkan dananya di Batam perlu untuk meningkatkan status Batam dari *Bonded Zone Plus* menjadi *Free Trade Zone* (FTZ). Hal tersebut sudah disampaikan kepada pemerintah maupun DPR bahkan diagendakan dalam rapat DPR dengan Pemerintah. Seperti diketahui bahwa walaupun Batam secara *de jure* belum ditetapkan sebagai FTZ namun secara *de facto* sudah melaksanakan cara-cara yang ditetapkan dalam FTZ dimaksud, diantaranya pemberian *tax incentives*. Usaha untuk mencapai FTZ bagi Batam nampaknya tidaklah mudah, banyak kendala yang timbul berkaitan dengan permohonan status tersebut, kendala yang dihadapi antara lain permasalahan estandar hukumnya (dalam bentuk KEPPRES, PP atau UU), sarana *sofá ware* sebagai penunjang yang harus diintegrasikan antar semua departemen terkait.

SEZ adalah merupakan suatu kerangka kerjasama Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Singapura atau lebih banyak dikenal G to G (*Government to Government*), adapun penerapan SEZ antara lain disebutkan untuk Pulau Bintan dan Pulau Batam, namun demikian berkembang pula bahwa Tanjung Balai Karimun termasuk dalam kerangka SEZ selain kedua daerah tersebut.

SURVEY KEGIATAN DUNIA USAHA (SKDU) DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU PERIODE TRIWULAN I-2006 DAN EKSPEKTASI TRIWULAN II-2006

Dalam rangka mendukung formulasi kebijakan moneter, Bank Indonesia menyelenggarakan SKDU untuk mendapatkan informasi dini mengenai indikasi perkembangan kegiatan ekonomi di sektor riil baik pada triwulan yang sedang berjalan maupun triwulan yang akan datang.

SKDU merupakan survey triwulanan yang dilaksanakan sejak triwulan I-1993 terhadap sekitar 2.000 perusahaan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan dipilih secara *purposive sampling*. Adapun pelaksanaan kegiatan survey SKDU untuk Provinsi Kepulauan Riau dilakukan oleh Kantor Bank Indonesia Batam bekerja sama dengan BPS Provinsi Kepulauan Riau dan mulai dilakukan sejak tahun 2006.

Pelaksanaan survey SKDU Provinsi Kepulauan Riau ini mengambil 5 (lima) sektor ekonomi sebagai sampel, yaitu: sektor industri pengolahan, sektor bangunan, sektor perdagangan, sub sektor hotel dan sub sektor transportasi laut. Alasan pemilihan sampel tersebut adalah berdasarkan pada tingkat kontribusi sektor-sektor tersebut yang cukup dominan pada pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Kepri. Misalnya: sektor industri pengolahan yang memberikan kontribusi lebih dari setengah total PDRB Provinsi Kepri. Sementara itu lokasi survey mengambil 2 (dua) lokasi yaitu: Kota Batam dan Kota Tanjung Pinang. Hal ini karena konsentrasi usaha sebagian besar berada pada dua daerah tersebut. Untuk daerah Kota Batam menjadi pusat konsentrasi industri pengolahan dan perdagangan, hotel, dan lain-lain, sedangkan Kota Tanjung Pinang disamping sebagai ibu kota Provinsi juga dominan pada sektor perdagangan dan sub sektor hotel.

Berikut adalah uraian hasil survey berdasarkan masing-masing sektor/sub sektor:

i. Sektor Industri Pengolahan:

Hasil survey pada sektor industri pengolahan untuk kondisi kegiatan usaha pada triwulan I-2006 menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan menghasilkan volume produksi yang meningkat dibandingkan volume produksi triwulan sebelumnya, dengan ekspektasi volume produksi kedepan juga akan mengalami peningkatan. Disamping itu kapasitas produksi responden pada triwulan ini meningkat namun pendapatan usaha/omset mengalami penurunan. Rata-rata jam kerja per-hari mengalami penurunan dengan jumlah karyawan perusahaan tetap, dan ekspektasi jumlah karyawan meningkat.

Adapun faktor-faktor yang membatasi kinerja perusahaan pada sektor industri pengolahan pada triwulan I-2006 sebagian besar responden menganggap kurangnya permintaan luar negeri sebagai faktor penyebab utama dimana 50% responden menjawab demikian.

ii. Sektor Konstruksi/Bangunan:

Pada sektor konstruksi/bangunan di wilayah Kota Batam dan Kota Tanjung Pinang menunjukkan bahwa nilai realisasi kontrak pada triwulan I-2006 meningkat namun ekspektasi realisasi kontrak menurun. Sementara itu ekspektasi jumlah karyawan pada sektor ini mengalami peningkatan. Ekspektasi pengusaha pada sektor usaha konstruksi/bangunan kedepan menunjukkan penurunan dimana sebagian besar responden memiliki ekspektasi volume kontrak kedepannya akan menurun. Adapun faktor yang membatasi kinerja perusahaan sektor bangunan untuk meningkatkan produksi triwulan I-2006 adalah persaingan dengan sektor sejenis, sedangkan faktor tingkat permintaan dan faktor biaya finansial sebagai faktor penyebab terbatasnya kinerja perusahaan.

iii. Sektor Perdagangan:

Hasil survey kegiatan dunia usaha pada sektor perdagangan menunjukkan bahwa rata-rata kinerja perusahaan mengalami perkembangan yang cukup stabil, diantaranya: nilai penjualan, ekspektasi penjualan, rata-rata jam kerja, jumlah karyawan, ekspektasi jumlah karyawan, volume pesanan dari dalam negeri, volume dengan pemasok, ekspektasi pesanan dengan pemasok, serta ekspektasi harga penjualan. Sementara faktor-faktor yang mengalami peningkatan antara lain: kapasitas perusahaan, daya saing, volume persediaan barang, harga penjualan, kondisi keuangan, serta akses kredit. Hal ini menunjukkan bahwa untuk sektor finansial dan kapasitas perusahaan mengalami perkembangan positif, sedangkan variabel lainnya rata-rata tetap.

Daerah Provinsi Kepulauan Riau sebagai daerah kepulauan dan memiliki lokasi yang cukup strategis menjadikan sektor perdagangan menjadi salah satu sektor ekonomi unggulan.

iv. Sub Sektor Hotel:

Sub Sektor Hotel menjadi salah satu sektor yang berkembang cukup pesat di wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Hal ini antara lain karena jumlah wisatawan mancanegara (khususnya dari Singapura dan Malaysia) yang berkunjung ke Batam dan Tanjung Pinang cukup tinggi.

Berdasarkan hasil survey pada triwulan ini ditunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan responden memiliki peningkatan ekspektasi jumlah karyawan yang meningkat pada triwulan kedepan. Hal ini antara lain dipengaruhi oleh menurunnya jumlah karyawan pada triwulan I-2006. Sementara dari sisi keuangan, sebagian besar perusahaan mengalami kondisi keuangan yang menurun dibandingkan triwulan sebelumnya dimana responden menganggap bahwa akses kredit pada periode survey menurun.

v. Sub Sektor Restoran:

Pada triwulan I-2006, pengusaha yang bergerak pada sub-sektor restoran menunjukkan ekspektasi penjualan kedepan meningkat, sementara itu volume permintaan dan ekspektasi volume permintaan

juga meningkat. Adapun faktor-faktor yang membatasi kinerja sub-sektor restoran untuk meningkatkan produksi pada triwulan I-2006 antara lain: kurangnya permintaan serta persaingan dengan sektor sejenis.

vi. Sub Sektor Transportasi Laut:

Dari hasil pengolahan kuesioner untuk sub sektor transportasi laut, secara umum jawaban responden pesimis dengan kondisi kegiatan usahanya. Sebagian besar *item* kuesioner sub-sektor ini menunjukkan penurunan, misalnya pada komponen nilai pendapatan, ekspektasi nilai pendapatan, kapasitas produksi, volume permintaan, ekspektasi volume permintaan pada triwulan II-2006, tarif angkutan, kondisi keuangan, dan situasi bisnis. Adapun penyebab utama yang membatasi aktivitas bisnis transportasi laut adalah kenaikan harga bahan bakar minyak yang cukup besar sehingga berdampak pada omset/pendapatan. Disamping itu juga berkurangnya wisatawan mancanegara yang berasal dari negara tetangga yang berkunjung ke Provinsi Kepulauan Riau.

BOKS - 3

DESEMINASI KEBIJAKAN PERDAGANGAN DENGAN NEGARA MITRA DALAM RANGKA PENINGKATAN PERDAGANGAN LINTAS BATAS DENGAN NEGARA TETANGGA

Kota Batam terletak berseberangan dengan negara tetangga dimana sebelah Utara berbatasan dengan negara Singapura dan Malaysia, di bagian selatan berbatasan dengan kecamatan Moro (Filipina Selatan), sebelah Barat dengan Kecamatan Karimun dan Laut Internasional, dan sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Bintan Utara/Selatan. Salah satu faktor tersebut yang mendorong topik “deseminasi kebijakan perdagangan dengan negara mitra dalam rangka peningkatan perdagangan lintas batas dengan negara tetangga” ini diangkat untuk dibahas.

Adapun yang dimaksud dengan pelintas batas adalah penduduk yang diam atau bertempat tinggal dalam wilayah perbatasan negara serta memiliki Kartu Identitas Lintas Batas yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang, yang melakukan perjalanan dinas batas di daerah perbatasan melalui pos pengawas lintas batas.

Faktor-faktor yang mendukung perdagangan lintas batas, antara lain:

- a. kedekatan geografis
- b. kemudahan sarana
- c. ekonomis
- d. hubungan kekeluargaan
- e. keterkaitan sosial budaya

Dasar hukum pembangunan daerah perbatasan antara lain: GBHN 1999 – 2004, Jakstranas, UU No.25/2000 tentang Propenas 2000 – 2004 yang menegaskan bahwa pembangunan daerah perbatasan dilakukan melalui dua pendekatan yaitu: kesejahteraan dan keamanan (melalui peningkatan aksesibilitas dan percepatan pencapaian kesetaraan pengembangan wilayah termasuk dengan negara tetangga).

Hingga saat ini, terdapat beberapa perjanjian perdagangan lintas batas (*Border Trade Agreement*) antara Indonesia dengan negara tetangga, diantaranya adalah:

- ✍ Indonesia – Malaysia (24 Agustus 1970)
- ✍ Indonesia – Philipina (08 Agustus 1974)
- ✍ Indonesia – Papua New Genua (11 April 1990)

- ✍ Indonesia – Timor Leste (11 Juni 2003), sementara antara Indonesia dengan Singapura hingga saat ini belum terdapat perjanjian perdagangan lintas batas, demikian juga dengan Thailand meskipun hal ini sudah disinggung dalam draft *Trade Agreement*.

Terkait dengan perjanjian perdagangan lintas batas (*Border Trade Agreement*), terdapat pokok-pokok yang perlu diperhatikan, diantaranya:

- i. Nilai limit transaksi
- ii. Definisi penduduk perbatasan
- iii. Penduduk yang dibenarkan mengadakan perdagangan lintas batas
- iv. Daerah-daerah dalam *Border Trade Agreement* (BTA) dan *exit/entry point* nya
- v. Satuan wilayah (kec/sub district)
- vi. Barang-barang yang dibenarkan dalam BTA

Gambaran wilayah perbatasan Indonesia untuk perbatasan laut adalah:

- Pantai timur Sumatera (Prov. Aceh NAD, Prov. Riau, Prov. Kepri) berbatasan dengan Semenanjung Malaysia (Johor, Selangor, Melaka, Negeri Sembilan), Singapura, dan Thailand
- Prov. Kaltim (Nunukan & Sebatik) berbatasan dengan Malaysia (Sabah)
- Sulawesi Utara berbatasan dengan Philipina Selatan (Mindanao)

Dan gambaran wilayah perbatasan Indonesia untuk perbatasan darat adalah:

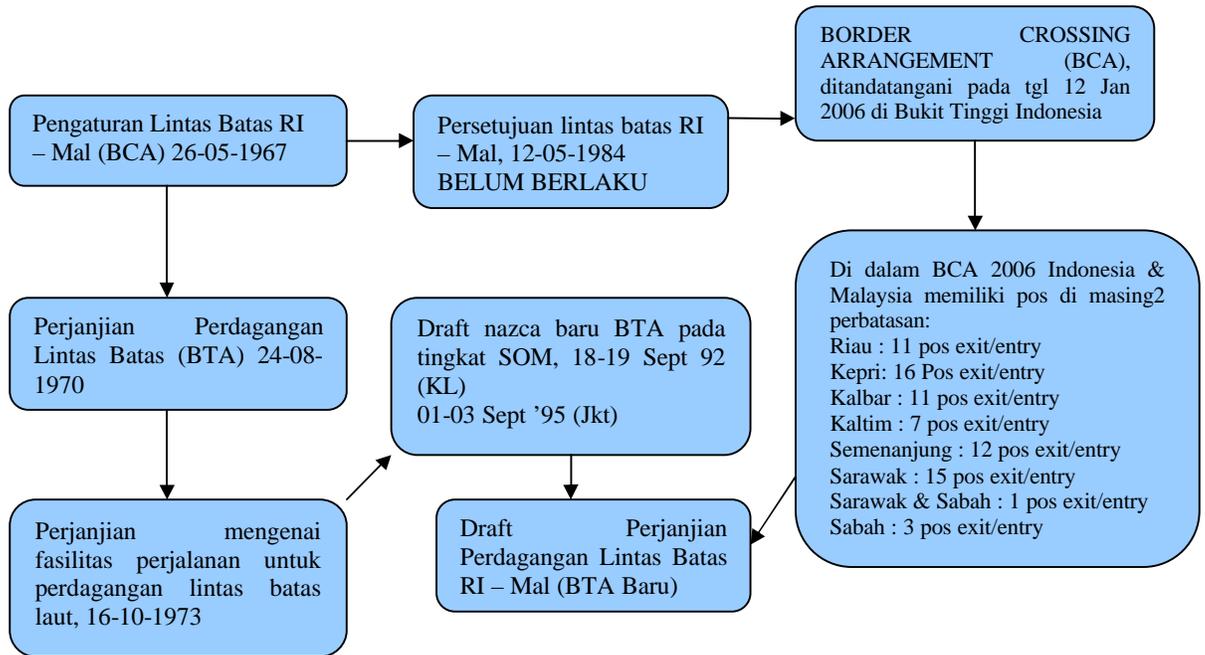
- Prov. Kalbar & Kaltim berbatasan dengan Malaysia (Serawak & Sabah)
- Prov. Papua berbatasan dengan Papua New Genue
- Prov. NTT berbatasan dengan Timor Leste

Untuk perdagangan lintas batas antara Indonesia dengan negara tetangga, terdapat batas nilai perdagangan yang diberlakukan, yaitu:

- ? RI – Malaysia:
 - Darat : MYR 600/bulan/orang
 - Laut : MYR 600/sekali pelayaran/orang
- ? RI – Philipina:
 - USD 150/perahu/sekali pelayanan/orang
 - USD 1,500/kapal (kumpit)/sekali pelayaran/orang/bulan
- ? RI – Papua New Genue:
 - USD 300/bulan/orang (diatur dalam *special arrangement*)
- ? RI – Timor Leste:
 - Dalam perundingan, diusulkan USD 1,500/bulan/orang

Pada kegiatan perdagangan lintas batas antara Indonesia dengan Malaysia, jenis komoditi yang diperdagangkan adalah hasil pertanian dan hasil-hasil lainnya yang berasal dari daerah perbatasan RI, tidak termasuk minyak, mineral dan biji-biji tambang, sedangkan dari Malaysia berupa barang-barang kebutuhan sehari-hari, barang perlengkapan industri yang dibutuhkan masyarakat perbatasan.

**SKEMA KAITAN BORDER CROSS ARRANGEMENT DAN BORDER TRADE AGREEMENT
ANTARA REPUBLIK INDONESIA - MALAYSIA**



BOKS - 4

HASIL SURVEY INDEKS HARGA PROPERTI RESIDENSIAL (IHPR) DI KOTA BATAM PERIODE TRIWULAN I - 2006

Survey Indeks Harga Properti Residensial (IHPR) di Kota Batam dilakukan secara triwulanan yang merupakan kerjasama antara Kantor Bank Indonesia Batam dengan Politeknik Batam. Survey yang mulai dilakukan sejak tahun 2005 ini (tahun 2005 bekerjasama dengan Universitas Internasional Batam) bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai perkembangan harga properti residensial baik pada triwulan bersangkutan maupun perkiraan triwulan berikutnya. Disamping itu data IHPR juga dapat digunakan sebagai data pembandingan dalam mengetahui inflasi harga asset Indonesia.

Berdasarkan hasil survey pada triwulan I – 2006 dapat disimpulkan beberapa hal:

- a. Pemilihan sampel penelitian diambil dari lokasi proyek yang dijadikan obyek penelitian berdasarkan Pengembangan Sub Wilayah Pengembangan (SWP) Badan Otorita Batam, yaitu: Batam Center, Batu Ampar, Sekupang, Mukakuning, Tanjung Uncang, Nongsa, Kabil, dan Duriangkang.
- b. Realisasi lahan bila dibandingkan dengan triwulan IV-2005 menunjukkan adanya peningkatan persentase rata-rata realisasi luas lahan proyek properti dari 73,57% menjadi 76,61% pada triwulan I – 2006
- c. Berdasarkan KPR, terlihat bahwa BTN tetap merupakan pilihan utama dalam memberikan fasilitas KPR properti di Batam (60,87%) yang meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yakni 42,60%. Bank lainnya adalah Bank Niaga (13,04%) dan BNI (8,70%), serta Bank Danamon, Bank Buana, NISP dan BII masing-masing sebesar 4,35%
- d. Untuk profil properti residensial, terlihat bahwa tipe rumah yang ditawarkan oleh pengembang masih didominasi oleh kelas kecil (41,30%) disusul tipe sedang (32,61%) dan tipe besar (26,09%)
- e. Berdasarkan target market, klasifikasi rumah yang ditawarkan dari urutan terbanyak sampai dengan terkecil adalah rumah sederhana (35,42%), rumah menengah atas (25,00%), rumah menengah (20,83%), rumah mewah (10,42%), dan rumah sangat sederhana (8,33%). Bila dibandingkan dengan survey pada periode sebelumnya terlihat adanya penurunan pada kelas rumah menengah dari 29,66% pada tahun 2005 turun menjadi 20,83% pada triwulan I – 2006. namun ternyata dibarengi dengan kenaikan pada penjualan rumah sangat sederhana (dari 31,36% menjadi 35,42% pada triwulan I – 2006) serta kenaikan pada tipe rumah menengah atas (dari 21,19% menjadi 25,00% pada triwulan I – 2006)
- f. Harga properti residensial di Kota Batam menunjukkan adanya kenaikan pada harga rata-rata sampel properti di Batam, dimana pada triwulan IV – 2005 sebesar Rp.230.277.3349,29 naik menjadi Rp.231.907.499,20 pada triwulan I – 2006. Bila dilihat berdasarkan klasifikasi rumah terdapat kenaikan rata-rata pada tipe kecil (dari Rp.63.084.725,08 menjadi Rp.67.927.080,20) serta kenaikan pada tipe rumah sedang (dari Rp.191.220.382,12 menjadi Rp.202.099.510,76). Namun pada tipe rumah besar terjadi penurunan harga rata-rata dari Rp.530.669.083,98 menjadi Rp.528.803.148,25. Bila dilihat berdasarkan SWP telah terjadi kenaikan di hampir semua wilayah kecuali daerah Duriangkang dan Batu Ampar.

- g. Dari hasil survey terlihat bahwa secara umum terjadi kenaikan IHPR Kota Batam pada triwulan I – 2006 sebesar 0,71%, dimana kenaikan terjadi pada tipe rumah sedang (naik sebesar 5,69%) dan tipe rumah kecil (naik sebesar 7,68%). Namun terlihat adanya sedikit penurunan IHPR pada tipe rumah besar (turun 0,35%). Bila dilihat berdasarkan SWP-OB terlihat bahwa pada hampir semua wilayah pengembangan mengalami kenaikan IHPR kecuali daerah Duriangkang (turun sebesar 16,21%) dan Batu Ampar (turun 1,80%). Daerah yang paling tinggi mengalami kenaikan IHPR adalah mukakuning (naik sebesar 36,01%) dan Sekupang (naik 28,78%). Sedangkan daerah Batam Center tingkat kenaikan IHPR cenderung stabil (2,64%).
- h. Masalah utama yang dihadapi oleh pengembang adalah tingkat suku bunga yang cukup tinggi dan tidak stabil, dan disamping masalah marketing penjualan properti di Batam, tingginya kenaikan harga material serta permasalahan administrasi perijinan. Masalah lainnya adalah mengenai kepengurusan HPL dan HGB, pajak, tingginya inflasi dan adanya permasalahan rumah liar.
- i. Dengan menggunakan analisa trend dan data hasil survey, diperkirakan tingkat pertumbuhan IHPR Kota Batam pada triwulan selanjutnya (triwulan II – 2006) yaitu sebesar 101,77 (naik 1,77%).

**TABEL 1. PDRB PROVINSI KEPULAUAN RIAU ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000
MENURUT LAPANGAN USAHA 2005 - 2006 (JUTAAN RUPIAH)**

LAPANGAN USAHA	2004 *)				2005				2006
	TRWI	TRWII	TRWIII	TRWIV	TRWI	TRWII	TRWIII	TRWIV	TRWI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1. PERTANIAN	59.755,18	60.432,87	60.884,65	61.110,55	333.331,80	336.520,88	361.306,57	353.467,25	378.314,54
a. Tanaman Pangan & Hortikultura	8.433,68	8.531,94	8.597,45	8.630,20	23.509,21	20.625,21	20.475,96	13.915,94	23.019,89
b. Perkebunan	5.538,04	5.590,11	5.624,83	5.642,18	15.075,58	21.689,59	26.130,44	19.158,74	19.358,26
c. Peternakan	8.062,44	8.172,08	8.245,17	8.281,72	56.198,66	55.844,75	56.633,71	57.687,59	58.064,17
d. Kehutanan	1.756,14	1.770,16	1.779,50	1.784,18	4.429,06	5.185,53	4.960,32	5.253,01	5.716,29
e. Perikanan	35.964,88	36.368,58	36.637,70	36.772,27	257.628,50	253.801,01	273.582,11	271.367,91	272.155,92
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	41.475,72	41.795,24	42.008,24	42.114,75	513.779,96	514.874,68	530.515,95	523.590,30	524.705,03
a. Pertambangan	28.681,25	28.898,04	29.042,56	29.114,82	450.311,47	446.004,26	457.874,84	447.461,74	447.788,08
b. Pertambangan non migas					33.873,47	38.779,16	41.134,17	43.967,52	44.104,33
c. Penggalian	12.794,47	12.897,20	12.965,68	12.999,93	29.595,02	30.091,26	31.506,94	32.161,05	32.812,62
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	735.749,43	744.194,41	749.824,40	752.639,40	4.923.237,99	5.064.164,01	5.161.245,41	5.280.709,94	5.342.551,90
a. Industri Migas	730.321,01	738.710,00	744.302,67	747.099,00	-	-	-	-	-
b. Industri Non migas	5.428,42	5.484,41	5.521,73	5.540,40	4.923.237,99	5.064.164,01	5.161.245,41	5.280.709,94	5.342.551,90
4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH	18.099,36	18.290,41	18.417,77	18.481,45	16.971,43	17.454,17	17.652,93	18.197,85	18.288,26
a. Listrik	16.315,55	16.493,11	16.611,48	16.670,67	13.985,19	14.456,25	14.637,19	15.146,47	15.202,61
b. Air Bersih	1.783,81	1.797,30	1.806,29	1.810,78	2.986,24	2.997,92	3.015,74	3.051,39	3.085,65
5. BANGUNAN	57.204,80	57.747,48	58.109,27	58.290,17	187.767,28	190.907,00	199.906,19	204.073,75	209.025,45
6. PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN	177.111,48	179.088,01	180.405,70	181.064,54	611.923,30	619.780,77	631.136,96	628.386,04	630.612,82
a. Perdagangan Besar dan Eceran	143.638,43	145.276,90	146.369,21	146.915,36	529.084,70	532.659,12	541.581,72	538.321,77	539.529,91
b. Hotel	21.267,28	21.489,55	21.637,74	21.711,83	53.736,49	57.478,32	59.404,63	59.536,81	60.082,47
c. Restoran	12.205,77	12.321,56	12.398,75	12.437,35	29.102,10	29.643,34	30.150,61	30.527,45	31.000,44
7. PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI	66.777,72	67.472,95	67.936,44	68.168,17	265.422,85	273.572,82	287.039,59	298.041,42	305.931,92
a. Angkutan	47.231,99	47.683,13	47.983,89	48.134,25	234.315,04	241.672,91	253.811,82	263.291,96	270.710,30
b. Komunikasi	19.545,73	19.789,82	19.952,55	20.033,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. KEUANGAN, PERSEWAAN & JASA PRS	69.822,76	70.645,51	71.193,99	71.468,24	329.789,12	326.188,13	334.297,46	345.351,12	351.905,08
a. Bank	15.556,64	15.873,93	16.085,45	16.191,21	222.594,37	217.021,56	222.917,33	231.118,32	237.159,82
b. Lembaga Keuangan Tanpa Bank & JPK	4.519,18	4.559,41	4.586,22	4.599,63	11.712,35	11.838,68	12.039,12	12.307,18	12.422,04
c. Jasa Penunjang					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d. Sewa Bangunan	48.775,13	49.232,24	49.536,98	49.689,35	93.453,45	95.240,52	97.188,45	99.706,88	100.044,59
e. Jasa Perusahaan	971,81	979,93	985,34	988,05	2.028,96	2.087,36	2.152,56	2.218,75	2.278,63
9. JASA - JASA	47.372,21	47.791,91	48.071,69	48.211,59	144.507,06	146.278,11	147.375,25	149.507,54	150.675,71
P D R B	1.273.368,66	1.287.458,79	1.296.852,15	1.301.548,86	7.326.730,78	7.489.740,57	7.670.476,32	7.801.325,21	7.912.010,71

Sumber : BPS Batam

TABEL 2. PERKEMBANGAN INDEKS HARGA KONSUMEN (IHK) PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Jan '05 s.d Mar '06 (Tahun 2002=100)

Kelompok	Januari 05		Februari 05		Maret 05		Januari 06		Februari 06		Maret 06	
	Indeks	% Perbh.	Indeks	% Perbh.	Indeks	% Perbh.	Indeks	% Perbh.	Indeks	% Perbh.	Indeks	% Perbh.
UMUM	112.21	1.64	111.45	(0.68)	113.33	1.69	128.40	1.32	128.53	0.10	127.57	-0.75
I. BAHAN MAKANAN	112.22	5.10	108.09	(2.81)	109.82	1.60	129.55	4.49	129.92	0.29	126.00	-3.02
a. Padi-padian, umbi-umbian & hasil hasilnya	129.81	7.31	134.27	3.44	134.32	0.04	144.90	6.23	160.56	10.81	157.25	-2.06
b. Daging dan hasil-hasilnya	98.16	4.57	97.27	(0.91)	95.96	(1.35)	110.62	5.60	109.53	-0.99	106.43	-2.83
c. Ikan segar	113.68	2.39	108.52	(4.54)	110.66	1.97	127.38	7.59	130.21	2.22	128.80	-1.08
d. Ikan diawetkan	103.82	1.86	105.91	2.01	107.38	1.39	124.02	0.95	126.92	2.34	129.36	1.92
e. Telur, susu dan hasil-hasilnya	100.25	1.52	100.33	0.08	99.39	(0.94)	111.07	2.77	111.80	0.66	110.11	-1.51
f. Sayuran	127.73	12.69	98.96	(22.52)	117.38	18.61	172.48	12.48	151.84	-11.97	134.02	-11.74
g. Kacang-kacangan	111.61	0.23	112.47	0.77	114.34	1.66	117.18	3.45	117.18	0.00	117.11	-0.06
h. Buah-buahan	110.58	2.12	114.89	3.90	114.06	(0.72)	119.25	-2.84	120.38	0.95	115.84	-3.77
i. Bumbu-bumbuan	98.21	16.06	91.45	(6.88)	90.23	(1.33)	140.16	0.31	133.60	-4.68	129.00	-3.44
j. Lemak dan minyak	105.85	(2.36)	106.04	0.18	106.04	0.00	116.37	-0.86	114.78	-1.37	114.16	-0.54
k. Bahan makanan lainnya	116.08	0.83	117.27	1.03	117.13	(0.12)	124.71	0.00	124.83	0.10	124.83	0.00
II. MAKANAN JADI, MINUMAN, ROKOK & TEMBAKAU	117.09	0.84	117.53	0.38	117.88	0.30	127.97	0.53	127.96	0.00	128.49	0.41
a. Makanan jadi	117.67	0.77	117.07	0.00	117.17	0.09	128.96	0.08	128.97	0.00	129.11	0.11
b. Minuman yang tidak beralkohol	117.43	2.95	120.24	2.39	122.07	1.52	128.30	2.68	128.20	-0.08	126.63	-1.22
c. Rokok, tembakau dan minuman beralkohol	116.98	0.01	116.88	(0.05)	116.93	0.04	126.48	0.16	126.48	0.00	128.50	1.60
III. PERUMAHAN	112.45	0.41	112.49	0.04	112.77	0.25	119.86	0.08	119.89	0.03	119.92	0.03
a. Biaya tempat tinggal	107.30	0.01	107.32	0.02	107.38	0.06	111.35	0.00	111.35	0.00	111.36	0.01
b. Bahan bakar, penerangan dan air	131.33	1.42	131.42	0.07	132.33	0.69	148.77	0.00	148.77	0.00	148.77	0.00
c. Perlengkapan rumah tangga	103.53	0.00	103.54	0.01	103.56	0.02	107.50	-0.26	107.57	0.07	107.77	0.19
d. Penyelenggara rumah tangga	102.45	0.04	102.57	0.12	102.77	0.19	108.06	1.03	108.39	0.31	108.48	0.08
IV. SANDANG	105.38	0.75	105.23	(0.14)	105.65	0.40	111.96	0.31	112.24	0.25	111.86	-0.34
a. Sandang laki-laki dewasa	100.87	0.00	100.96	0.09	100.96	0.00	102.96	0.00	102.96	0.00	102.96	0.00
b. Sandang wanita dewasa	100.40	0.00	100.38	(0.02)	100.38	0.00	100.67	0.00	100.67	0.00	100.67	0.00
c. Sandang anak-anak	101.83	(0.26)	102.00	0.17	102.38	0.37	102.98	0.06	103.19	0.20	103.19	0.00
d. Sandang pribadi dan sandang lainnya	131.24	4.58	129.82	(0.08)	132.10	1.76	169.71	1.40	171.26	0.91	168.69	-1.50
V. KESEHATAN	102.68	0.34	120.73	0.05	103.02	0.28	107.44	0.29	107.52	0.07	107.74	0.20
a. Jasa kesehatan	110.10	0.00	110.10	0.00	111.03	0.84	111.03	0.00	111.03	0.00	111.03	0.00
b. Obat-obatan	106.15	0.00	106.10	(0.05)	105.29	(0.76)	112.18	0.00	112.18	0.00	112.94	0.68
c. Jasa Perawatan Jasmani	102.69	0.00	102.69	0.00	102.69	0.00	111.97	0.00	111.97	0.00	111.97	0.00
d. Perawatan Jasmani dan Kosmetika	99.37	0.61	99.47	0.01	99.82	0.35	104.56	0.51	104.69	0.12	104.91	0.21
VI. PENDIDIKAN, REKREASI & OLAH RAGA	112.08	0.00	112.16	0.07	112.16	0.00	120.90	-0.07	120.90	0.00	120.70	-0.17
a. Jasa Pendidikan	122.56	0.00	122.56	0.00	122.56	0.00	137.22	0.00	137.22	0.00	137.22	0.00
b. Kursus-kursus/Pelatihan	104.97	0.00	104.97	0.00	104.97	0.00	104.97	0.00	104.97	0.00	104.97	0.00
c. Perlengkapan/Peralatan Pendidikan	107.17	0.00	107.17	0.00	107.17	0.00	107.18	0.00	107.18	0.00	107.18	0.00
d. Rekreasi	103.40	0.00	103.63	0.22	103.63	0.00	110.75	-0.21	110.75	0.00	110.15	-0.54
e. Olahraga	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
VII. TRANSPOR & KOMUNIKASI	112.43	0.00	112.43	0.00	120.52	7.20	157.48	0.02	154.48	0.00	154.60	0.08
a. Transpor	109.68	0.00	109.68	0.00	122.68	11.80	177.19	0.03	177.19	0.00	177.12	-0.40
b. Komunikasi dan pengiriman	115.80	0.00	115.80	0.00	115.80	0.00	115.92	0.00	115.92	0.00	115.92	0.00
c. Sarana dan penunjang transpor	102.17	0.00	102.17	0.00	102.28	0.11	103.02	0.00	103.02	0.00	103.02	0.00
d. Jasa Keuangan	163.09	0.00	163.09	0.00	163.09	0.00	163.97	0.00	163.97	0.00	170.78	4.15

Sumber : BPS Batam

TABEL 3. PERKEMBANGAN INFLASI KOTA BATAM, PEKANBARU DAN NASIONAL

Kota	Q.I/03	Q.II/03	Q.III/03	Q.IV/03	Q I/04	Q II/04	Q III/04	Q IV/04	Q I/05	Q II/05	Q III/05	Q IV/05	Q I/06
1. Batam	2.07	1.10	0.75	2.35	0.47	1.10	0.70	1.89	2.65	0.39	1.52	14.79	0.66
2. Pekanbaru	2.28	2.13	1.61	2.76	1.20	3.45	1.30	2.71	2.75	0.14	2.91	17.1	0.73
3. Nasional	0.77	1.23	1.24	2.50	0.91	2.35	0.49	2.46	3.19	1.05	2.03	17.11	1.98

Sumber : BPS Batam

**TABEL 4. DATA BANK UMUM
WILAYAH KERJA BANK INDONESIA BATAM**

Dim. Juta Rp.

KETERANGAN	Periode					
	Mar-05	Jun-05	Sep-05	Dec-05	Mar-06	May-06
TOTAL ASSET	9,316,232	9,715,095	10,213,912	10,242,657	10,559,530	11,810,931
DANA PIHAK III	7,806,495	8,120,960	8,373,778	8,351,646	8,552,495	9,816,116
a. Giro	3,106,069	3,183,277	3,262,739	3,388,029	3,429,726	4,309,705
b. Deposito	1,616,147	1,805,531	2,070,995	2,030,477	2,302,858	2,524,742
c. Tabungan	3,084,279	3,132,152	3,040,044	2,933,140	2,819,911	2,981,669
KREDIT						
a. Jenis Penggunaan	4,761,130	5,104,373	5,685,474	5,541,220	5,771,562	6,048,873
- Modal Kerja	1,803,592	1,848,852	1,962,136	1,956,742	2,081,520	2,180,785
- Investasi	1,359,514	1,433,060	1,712,592	1,574,838	1,511,012	1,601,558
- Konsumsi	1,598,024	1,822,461	2,010,746	2,009,640	2,179,030	2,266,530
b. Golongan Kredit	4,761,130	5,104,373	5,685,474	5,541,220	5,771,562	6,048,873
- KUK	794,299	787,396	757,976	1,393,009	733,613	739,852
- Non KUK	3,966,831	4,316,977	4,927,498	4,148,211	5,037,949	5,309,021
b. Jenis Kredit	4,761,130	5,104,373	5,685,474	5,541,220	5,771,562	6,048,873
- UMKM	2,623,049	2,828,126	3,016,067	2,936,656	3,157,413	3,259,188
- Non UMKM	2,138,081	2,276,247	2,669,407	2,604,564	2,614,149	2,789,685
c. Kolektibilitas	4,761,130	5,104,373	5,685,474	5,541,220	5,771,562	6,048,873
- Lancar	4,267,390	4,288,212	4,615,820	4,515,995	4,650,364	4,771,329
- D.P.Khusus	364,458	605,892	776,895	673,991	789,573	904,077
- Kurang Lancar	21,268	46,585	63,022	86,655	22,604	39,653
- Diragukan	54,412	33,562	79,628	23,631	52,004	43,733
- Macet	53,602	130,122	150,109	240,948	257,017	290,081
RATIO						
a. Loan to Deposit Ratio (LDR)	60.99%	62.85%	67.90%	66.35%	67.48%	61.62%
b. Non Performing Loans (NPL)	2.72%	4.12%	5.15%	6.34%	5.75%	6.17%
c. Penyaluran KUK	16.68%	15.43%	13.33%	25.14%	12.71%	12.23%
b. Penyaluran UMKM	55.09%	55.41%	53.05%	53.00%	54.71%	53.88%

Sumber : Bank Indonesia Batam

TABEL 5. DATA BANK UMUM
WILAYAH BATAM

Dlm. Juta Rp.

KETERANGAN	Periode								
	Dec-03	Mar-04	Jun-04	Sep-04	Des-04	Mar-05	Jun-05	Sep-05	Mar-2006
TOTAL ASSET	5,049,249	5,027,493	5,574,348	6,142,177	6,703,118	7,077,782	7,601,663	8,022,161	8,160,702
DANA PIHAK III	4,172,146	4,161,054	4,564,449	5,077,299	5,458,347	5,599,666	6,049,847	6,224,301	6,178,643
a. Giro	1,706,028	1,728,127	2,041,650	2,202,758	2,299,718	2,370,210	2,468,863	2,492,805	2,504,488
b. Deposito	1,004,563	910,211	858,875	1,024,906	1,186,142	1,220,828	1,431,173	1,659,129	1,758,180
c. Tabungan	1,461,555	1,522,716	1,663,924	1,849,635	1,972,487	2,008,628	2,149,811	2,072,367	1,915,975
KREDIT									
a. Jenis Penggunaan	2,542,906	2,678,470	3,001,928	3,400,971	3,763,287	4,121,633	4,465,106	4,988,122	5,029,911
- Modal Kerja	799,188	838,320	953,967	1,159,585	1,330,831	1,468,905	1,563,527	1,662,105	1,774,551
- Investasi	830,697	862,000	972,148	1,041,932	1,137,937	1,238,569	1,314,150	1,564,101	1,355,768
- Konsumsi	913,021	978,150	1,075,813	1,199,454	1,294,519	1,414,159	1,587,429	1,761,916	1,899,592
b. Golongan Kredit	2,542,906	2,678,470	3,001,928	3,400,971	3,763,287	4,121,633	4,465,106	4,988,122	5,029,911
- KUK	619,857	641,619	633,924	636,527	632,251	628,934	616,624	597,065	577,135
- Non KUK	1,923,049	2,036,851	2,368,004	2,764,444	3,131,036	3,492,699	3,848,482	4,391,057	4,452,776
b. Jenis Kredit	2,542,906	2,678,470	3,001,928	3,400,971	3,763,287	4,121,633	4,465,106	4,988,122	5,029,911
- UMKM	1,412,686	1,518,976	1,685,735	1,930,859	2,083,288	2,165,864	2,387,664	2,539,087	2,648,616
- Non UMKM	1,130,220	1,159,494	1,316,193	1,470,112	1,679,999	1,955,769	2,077,442	2,449,035	2,381,295
c. Kolektibilitas	2,542,906	2,678,470	3,001,928	3,400,971	3,763,287	4,121,633	4,465,106	4,988,122	5,029,911
- Lancar	2,232,645	2,285,758	2,566,076	2,957,866	3,318,204	3,659,734	3,739,772	4,029,741	4,054,901
- D.P Khusus	250,145	288,987	300,149	297,860	338,391	344,339	527,718	742,746	736,427
- Kurang Lancar	35,480	59,398	37,858	44,462	20,746	19,622	44,873	51,316	19,663
- Diragukan	6,459	21,093	67,004	46,754	42,831	50,004	32,228	24,868	41,865
- Macet	18,177	23,234	30,841	54,029	43,115	47,934	120,515	139,451	177,055
RATIO									
a. Loan to Deposit Ratio (LDR)	60.95%	64.37%	65.77%	66.98%	68.95%	73.60%	73.81%	80.14%	81.41%
b. Non Performing Loan (NPLs)	2.36%	3.87%	4.52%	4.27%	2.84%	2.85%	4.43%	4.32%	4.74%
c. Penyaluran KUK	24.38%	23.95%	21.12%	18.72%	16.80%	15.26%	13.81%	11.97%	11.47%
d. Penyaluran UMKM	55.55%	56.71%	56.16%	56.77%	55.36%	52.55%	53.47%	50.90%	52.66%

Sumber : Bank Indonesia Batam

TABEL 6. DATA BANK UMUM
WILAYAH KEPULAUAN RIAU

dlm.juta Rp

KETERANGAN	Periode								
	Des.2003	Mar.2004	Jun.2004	Sept.2004	Des.2004	Mar.2005	Jun.2005	Sep.2005	Mar.2006
TOTAL ASSET	2,260,852	2,124,810	2,212,692	2,121,215	2,297,384	2,238,450	2,113,432	2,191,751	2,398,828
DANA PIHAK III	2,213,760	2,101,872	2,193,733	2,093,287	2,262,698	2,206,829	2,071,113	#####	2,373,852
a. Giro	698,449	669,593	704,267	657,979	697,680	735,859	714,414	769,934	925,238
b. Deposito	484,242	456,817	411,370	383,968	430,208	415,695	374,358	411,866	544,678
c. Tabungan	1,031,069	975,462	1,078,096	1,051,340	1,134,810	1,055,275	982,341	967,677	903,936
KREDIT									
a. Jenis Penggunaan	504,176	500,712	562,471	561,778	604,612	639,497	639,267	697,352	741,651
- Modal Kerja	307,912	288,057	322,296	283,867	323,299	334,687	285,325	300,031	306,969
- Investasi	57,688	60,570	68,116	95,299	79,091	120,945	118,910	148,491	155,244
- Konsumsi	138,576	152,085	172,059	182,612	202,222	183,865	235,032	248,830	279,438
b. Golongan Kredit	504,176	500,712	562,471	561,778	634,612	639,497	639,267	697,352	741,651
- KUK	125,133	124,182	142,179	143,535	165,137	165,365	170,772	160,911	156,478
- Non KUK	379,043	376,530	420,292	418,243	469,475	474,132	468,495	536,441	585,173
b. Jenis Kredit	504,176	500,712	562,471	561,778	634,612	639,497	639,267	697,352	741,651
- UMKM	420,223	400,819	442,417	408,356	452,779	457,185	440,462	476,980	508,797
- Non UMKM	83,953	99,893	120,054	153,422	181,833	182,312	198,805	220,372	232,854
c. Kolektibilitas	504,176	500,712	562,471	561,778	634,612	639,497	639,267	697,352	741,651
- Lancar	473,686	466,185	535,645	523,394	594,404	607,656	548,440	586,079	595,463
- D.P. Khusus	18,520	21,392	16,239	27,630	29,529	20,119	78,174	34,149	53,146
- Kurang Lancar	4,973	1,786	4,546	5,617	5,917	1,646	1,712	11,706	2,941
- Diragukan	828	4,579	962	2,820	1,280	4,408	1,334	54,760	10,139
- Macet	6,169	6,770	5,079	2,317	3,482	5,668	9,607	10,658	79,962
RATIO									
a. Loan to Dept Ratio (LDR)	22.77%	23.82%	25.64%	26.84%	26.72%	28.98%	30.87%	32.44%	31.24%
b. Non Performing Loan (NPL)	2.37%	2.62%	1.88%	1.91%	1.77%	1.83%	1.98%	11.06%	12.55%
c. Penyaluran KUK	24.82%	24.80%	25.28%	25.55%	26.02%	25.86%	26.71%	23.07%	21.10%
d. Penyaluran UMKM	83.35%	80.05%	78.66%	72.69%	71.35%	71.49%	68.90%	68.40%	68.60%

Sumber : Bank Indonesia Batam
Kepri (Tj.Pinang, Tj.Uban, Karimun dan Natuna)

**TABEL 7. DATA PENGALIRAN KAS MASUK / KELUAR
DAN KEGIATAN PTTB KBI BATAM**

No	Nama Bulan	Pengaliran Masuk (Jutaan Rp)	Pengaliran Keluar (Jutaan Rp)	Pemberian Tanda Tidak Berharga (Jutaan Rp)
1	Tahun 2000	462,953.66	2,635,234.81	398,055.62
2	Tahun 2001	629,831.60	2,987,016.25	239,678.80
3	Tahun 2002	1,033,638.93	2,549,992.51	452,865.93
4	Tahun 2003	1,495,116.25	2,484,657.11	788,860.84
	Januari 2004	174,980.47	169,119.33	83,128.86
	Februari 2004	154,955.15	169,709.50	79,702.05
	Maret 2004	152,339.51	242,448.34	97,463.28
	Trw. I 2004	482,275.13	581,277.17	260,294.19
	April 2004	152,857.99	288,966.46	111,347.04
	Mei 2004	137,012.24	242,827.66	78,855.53
	Juni 2004	121,594.16	359,354.24	121,919.03
	Trw. II 2004	411,464.39	891,148.36	312,121.60
	Juli 2004	180,275.04	259,625.84	169,516.95
	Agustus 2004	160,469.24	277,640.31	152,555.05
	September	142,558.76	299,878.74	91,383.82
	Trw. III 2004	483,303.04	837,144.89	413,455.82
	Oktober 2004	134,354.00	387,480.00	84,342.00
	Nopember 2004	207,334.00	548,980.00	55,606.00
	Desember 2004	198,076.19	403,276.86	168,836.92
	Trw. IV 2004	539,764.19	1,339,736.86	308,784.92
5	Tahun 2004	1,916,806.75	3,649,307.28	1,294,656.53
	Januari 2005	205,005.66	250,477.47	134,589.81
	Februari 2005	210,216.68	355,120.71	132,907.53
	Maret 2005	225,008.47	321,391.88	141,725.89
	Trw. I 2005	640,230.81	926,990.06	409,223.23
	April 2005	184,344.20	350,837.86	96,965.36
	Mei 2005	193,099.56	296,952.62	80,157.14
	Juni 2005	167,293.98	351,735.51	75,162.38
	Trw. II 2005	544,737.73	999,525.99	252,284.87
	Juli 2005	187,939.07	315,171.45	68,621.75
	Agustus 2005	151,851.55	311,778.20	34,082.81
	Sept 2005	159,589.62	386,899.07	30,538.20
	Trw. III 2005	499,380.25	1,013,848.73	133,242.75
6	Januari 2006	264,207.72	257,567.63	67,711.87
	Februari 2006	269,475.86	278,910.89	65,945.72
	Maret 2006	270,355.37	397,274.49	71,261.43
	Trw. I 2006	804,038.95	933,753.01	204,919.02

Sumber : Bank Indonesia Batam

TABEL 8. PERPUTARAN KLIRING BATAM, TANJUNG PINANG DAN TANJUNG BALAI KARIMUN

JENIS	Trw.III/2004		Trw.IV/2004		Trw.I/2005		Trw.II/2005		Trw.III/2005		Trw.I/2006	
	Total	Rata-Rata Perhari	Total	Rata-Rata Perhari	Total	Rata-Rata Perhari	Total	Rata-Rata Perhari	Total	Rata-Rata Perhari	Total	Rata-Rata Perhari
A. WARKAT KLIRING												
1. WARKAT (Lbr)	145,620	2,311	145,176	2,304	144,005	2,400	154,879	2,539	157,535	2,583	146,241	2,359
2. NOMINAL (Jt.Rp)	2,062,812	32,743	2,151,372	34,149	2,054,496	34,242	2,208,473	36,204	2,371,965	38,885	2,168,735	34,980
B. TOLAKAN KLIRING												
1. CEK KOSONG												
- Lembar	357	6	231	4	360	6	369	6	321	5	323	5
- Nominal (Jt.Rp)	8,429	134	8,940	142	11,296	188	8,456	139	7,845	129	18,482	298
2. BG. KOSONG												
- Lembar	620	10	500	8	500	8	618	10	660	11	537	9
- Nominal (Jt.Rp)	10,024	159	10,658	169	12,504	208	13,932	228	13,204	216	10,936	176
3. ALASAN LAIN												
- Lembar	524	8	367	6	570	10	637	10	653	11	528	9
- Nominal (Jt.Rp)	12,096	192	5,121	81	8,135	136	11,148	183	11,196	184	9,567	154
4. TOTAL TOLAKAN												
- Lembar	1,501	24	1,098	17	1,430	24	1,624	27	1,634	27	1,388	22
- Nominal (Jt.Rp)	30,549	485	24,719	392	31,914	532	33,536	550	32,245	529	38,985	629

Sumber : Bank Indonesia Batam